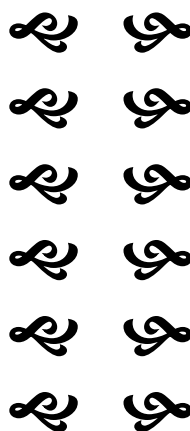




**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2025 – 2029**



**TONDANO,**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bimbinganNya kami boleh menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa tahun 2025-2029. Renstra merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam periode selama jangka waktu 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

Demikian Renstra ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tondano, 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KEPALA,

**Drs. ARTHUR N. PALILINGAN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680323 198902 1 002

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 Latar Belakang**

Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan arah dan kebijakan strategis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berpedoman pada Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban, demikian juga dokumen ini menjadi alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selang 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, perumusan kebijakan dan program pada Perangkat Daerah selama tiga tahun ke depan harus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, 2) Orientasi mengenai Renstra

Perangkat Daerah, 3) Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup 1) analisis gambaran umum wilayah, 2) analisis permasalahan, 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, 4) analisis isu strategis, 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, 6) perumusan strategis dan arah kebijakan, dan 7) perumusan program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

3. Penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi dan sinergi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Perumusan akhir

Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat Daerah dikirim ke BAPPELITBANGDA untuk dilakukan verifikasi guna memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

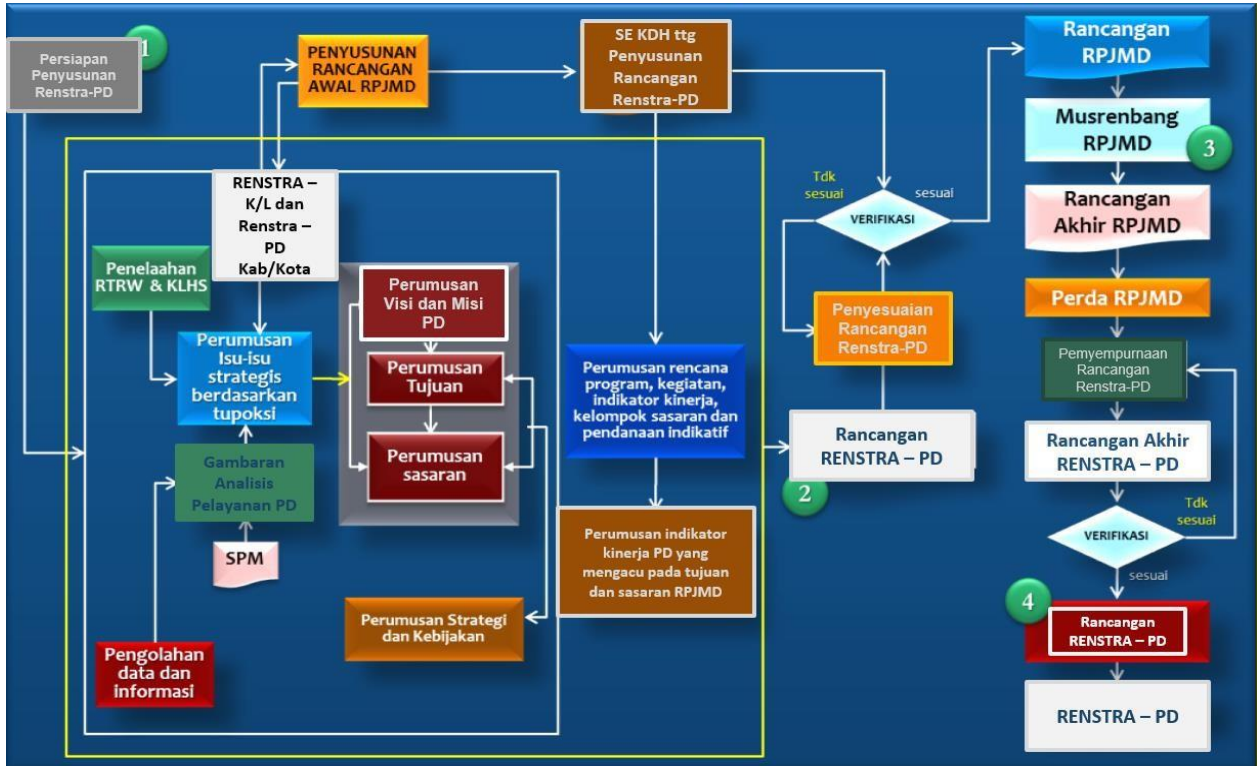
6. Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah hasil verifikasi BAPPELITBANGDA, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

**Gambar 1.1.1**

## Tahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung prioritas Kepala Daerah. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029;
25. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, dimana tugas tersebut menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang harus dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan kolaborasi secara sinergitas dan berkesinambungan.

#### **2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- b. Mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi yang merupakan urusan wajib bidang teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa.

- c. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa setiap tahunnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Minahasa, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu Isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PMD Kab. Minahasa

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

**BAB VIII      PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya Peraturan Bupati tersebut diganti dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

##### **1. Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

##### **2. Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- (3) Pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- (4) Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam;
- (5) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, serta pengembangan partisipasi masyarakat;
- (6) Penyelenggaraan penataan Desa;
- (7) Fasilitasi kerjasama Desa;
- (8) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- (9) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- (10) Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- (11) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
- (12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas sampai Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, diuraikan sebagai berikut :

**Kepala Dinas** mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemerintahan Desa;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa;
- f. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penataan Desa, pembinaan pemerintahan dan aparatur pemerintah Desa, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Sekretaris** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 2. Penyusunan program dan rencana kegiatan;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian;
4. Penyelenggaraan urusan perencanaan;
5. Penyelenggaraan urusan umum;
6. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
7. Penyelenggaraan urusan keuangan;
8. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**Kepala Bidang Penataan Desa** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan desa termasuk fasilitasi sarana prasarana, asset dan keuangan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Penataan Desa** menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di Bidang Penataan Desa;
- b. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa;
- c. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
- d. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- e. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
- f. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
- g. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa;
- h. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- j. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- k. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa, termasuk pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa dan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Peningkatan Kerjasama Desa** menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang Peningkatan Kerjasama Desa;

- b. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota;;
- c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
- f. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- g. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- i. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Administrasi Pemerintahan Desa** menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- e. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa;
- f. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- g. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- h. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
- i. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa;
- j. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- k. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa;
- l. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- m. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- n. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- o. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota sert pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- d. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- e. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- f. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- g. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (TRT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- h. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- i. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- j. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- k. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 3. Susunan Organisasi

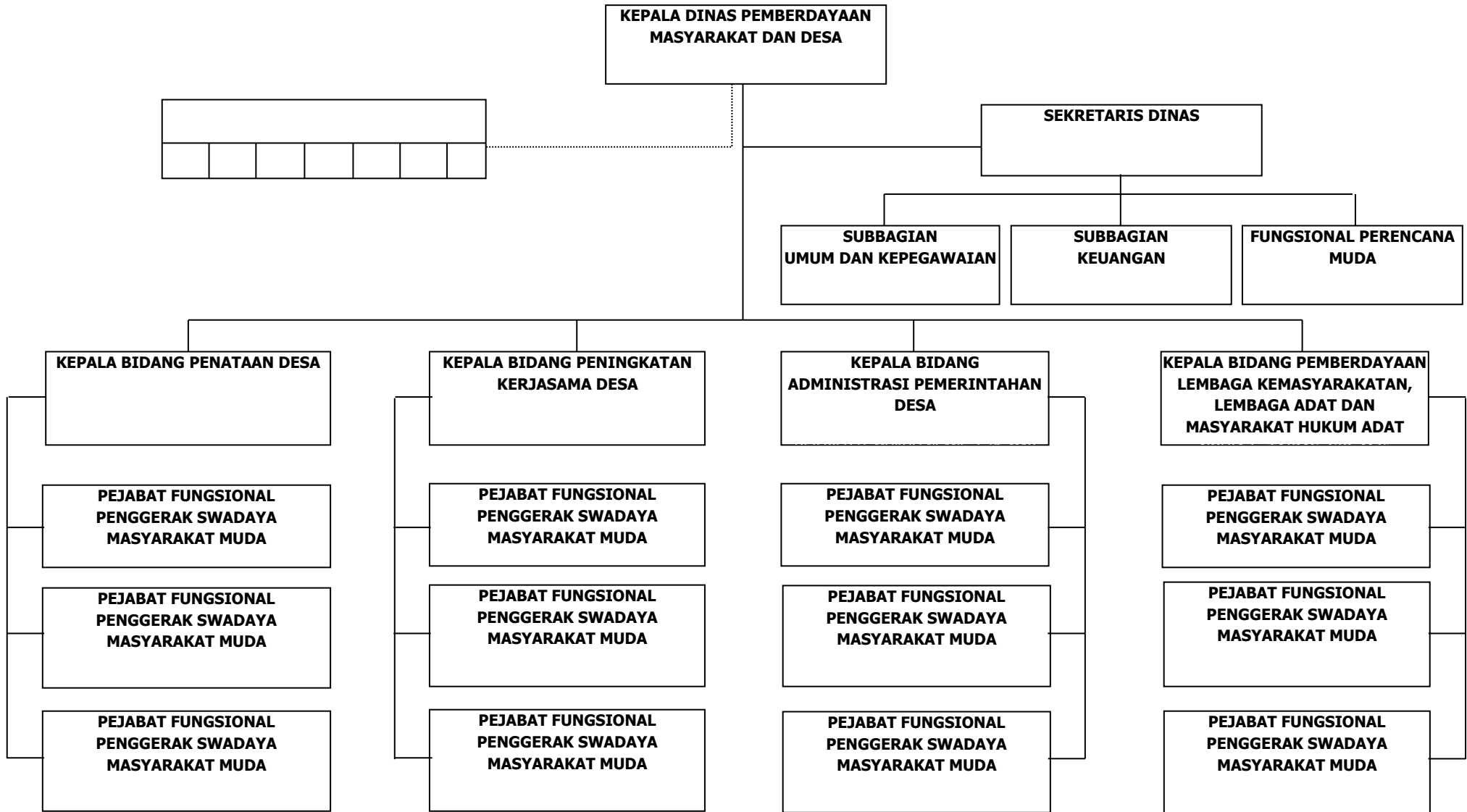
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 2 (dua) Subbagian dan 1 jabatan Fungsional, yaitu :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Subbagian Keuangan.
  - 3) Perencana Muda
- c. Bidang Penataan Desa, yang membawahi 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda.
  - d. Bidang Peningkatan Kerjasama Desa, yang membawahi 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda.
  - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, yang membawahi 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda.
  - f. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang membawahi 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN MINAHASA**

(Perbup Minahasa No. 55 Tahun 2021)



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana sebagai berikut :

- a. Jumlah ASN : 21 orang
  - Golongan IV/c : 1 orang
  - Golongan IV/b : - orang
  - Golongan IV/a : 5 orang
  - Golongan III/d : 12 orang
  - Golongan III/c : 3 orang
- b. Tenaga Harian Lepas/Kontrak
  - Tenaga Harian Lepas : 5 orang
  - Tenaga Supir : 1 orang
  - Tenaga Kebersihan : 1 orang
- c. Pendidikan ASN
  - S 2 : 8 orang
  - S 1 : 12 orang
  - D 3 : 1 orang
- d. Diklat Penjenjangan
  - Sepada/Adum/PIM IV : 2 orang
  - Spama/PIM III : 3 orang
  - Spamen/PIM II :
- e. Jabatan Struktural
  - Eselon II b : 1 orang
  - Eselon III a : 1 orang
  - Eselon III b : 4 orang
  - Eselon IV a : 2 orang
  - Fungsional : 12 orang

### b. Perlengkapan

Kondisi sumber daya perlengkapan dan peralatan kantor juga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi sehingga optimalisasi tugas dan fungsi dapat tercapai. Kondisi perlengkapan/aset/inventaris yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**  
*Gambaran Kondisi Asset Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa  
 Sampai dengan 31 Desember 2024*

| No  | Uraian                               | Volume |      | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|--------|------|-------------|
| 1   | 2                                    | 3      |      | 4           |
| 1.  | Lemari Kayu                          | 39     | Buah | 28 RB       |
| 2.  | Kendaraan Dinas<br>Toyota Hilux 2.4  | 1      | Unit | (DB 8023 B) |
| 3.  | Kendaraan Dinas Toyota Kijang LX 1.8 | 1      | Unit | Rusak Berat |
| 4.  | Kendaraan Dinas Mitsubishi Kuda      | 1      | Unit | Rusak Berat |
| 5.  | Sepeda Motor Kawasaki KLX/ New QTR   | 1      | Unit |             |
| 6.  | Sepeda Motor Yamaha All New Soul     | 1      | Unit |             |
| 7.  | Generator                            | 1      | Unit | RR          |
| 8.  | Mesin Absensi Solution               | 1      | Unit |             |
| 9.  | Kursi Tamu                           | 4      | Unit |             |
| 10. | Almari Besi                          | 3      | Unit | RR          |
| 11. | Dispenser                            | 4      | Unit | RR          |
| 12. | PC. Unit (Komputer)                  | 15     | Unit | 8 RB        |
| 13. | Brandkas                             | 2      | Unit |             |
| 14. | Televisi Tabung                      | 2      | Unit |             |
| 15. | Printer                              | 9      | Unit |             |
| 16. | Handy Talky (HT)                     | 1      | Unit | Rusak       |
| 17. | Meja Rapat                           | 11     | Buah |             |
| 18. | Camera Video                         | 1      | Unit |             |
| 19. | Handy Cam                            | 1      | Unit | RB          |
| 20. | Laptop                               | 15     | Unit | 6 RB, 1 RR  |
| 21. | Hardisk External                     | 2      | Unit | 2 RB        |
| 22. | Meja Kerja Pej. Es.II                | 2      | Unit |             |
| 23. | Meja Kerja Pej. Es. III              | 1      | Unit |             |
| 24. | Telephone                            | 1      | Unit | RB          |
| 25. | Facsimile                            | 2      | Unit | RB          |
| 26. | Mesin Paras                          | 1      | Unit | RB          |
| 27. | Rak Kayu                             | 1      | Buah |             |
| 28. | Camera Film                          | 2      | Unit |             |
| 29. | Note Book                            | 1      | Unit | RB          |
| 30. | Wireless                             | 1      | Unit |             |
| 31. | Meja Kerja                           | 3      | Unit |             |
| 32. | AC Panasonic                         | 1      | Unit |             |
| 33. | Tempat Tidur Kayu                    | 1      | Unit |             |
| 34. | Meja Makan                           | 1      | Unit |             |
| 35. | Kursi Rapat                          | 36     | Buah |             |
| 36. | Sofa                                 | 2      | Set  |             |
| 37. | Korden                               | 11     | Set  |             |

| No  | Uraian                                     | Volume  | Keterangan |
|-----|--|---------|------------|
| 1   | 2  | 3       | 4          |
| 38. | Meja ½ Biro                                | 2 Buah  |            |
| 39. | Lemari Es                                  | 1 Unit  |            |
| 40. | Kipas Angin                                | 2 Unit  |            |
| 41. | Televisi LED                               | 1 Unit  |            |
| 42. | Kursi Kerja Pj. ES II                      | 2 Unit  | 1 RB       |
| 43. | Generator                                  | 1 Unit  |            |
| 44. | LCD Projector                              | 1 Unit  |            |
| 45. | Kursi Kerja Pej. ES III                    | 1 Unit  |            |
| 46. | Pompa Air                                  | 1 Unit  |            |
| 47. | Wireless Amplifier Soundsystem (Behringer) | 1 Unit  |            |
| 48. | Slide Projector                            | 1 Unit  |            |
| 49. | Lemari Besi/Kaca                           | 3 Unit  |            |
| 50. | Speaker Huper Ak15                         | 1 Psg   |            |
| 51. | Kursi Rapat besi/kain                      | 50 Unit |            |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa

Gambaran kinerja yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja setiap tahun secara berkelanjutan guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa telah diberikan kepada pengguna layanan jasa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, kinerjanya dapat dilihat dari beberapa pencapaian selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

**Tabel 2.3.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas PMD Kabupaten Minahasa**

| TUJUAN/SASARAN  | INDIKATOR  |
|---|--|
| Tujuan 1 :  |  |
| Meningkatkan Pembangunan Desa yang Berkualitas                      | Persentase Desa Mandiri  |
| Sasaran :   |  |
| Meningkatnya Keberdayaan Desa                                       | Persentase pengentasan desa tertinggal                             |
|   | Persentase peningkatan status desa mandiri                         |
|   | Persentase desa dengan predikat desa berprestasi Tingkat Kabupaten |
| Tujuan 2:   |  |
| Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan | Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah           |

| TUJUAN/SASARAN  | INDIKATOR  |
|---|--|
| Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi                     |  |
| Sasaran:  |  |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |
|   | Indeks kepuasan pelayanan public                         |

**Tabel 2.3.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2024**

| No. | Indikator Kinerja  | Target (2024)        | Realisasi (2024)                      | Rasio Capaian (2024) |
|-----|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Persentase pengentasan desa tertinggal                             | 100%                 | 100%                                  | 100%                 |
| 2.  | Persentase peningkatan status desa mandiri                         | 93,27%               | 98,31%                                | 105,4%               |
| 3.  | Persentase desa dengan predikat desa berprestasi Tingkat Kabupaten | 11,01%               | 11,89%                                | 108%                 |
| 4.  | Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah           | B                    | (dalam tahapan penilaian Inspektorat) |                      |
| 5.  | Indeks kepuasan pelayanan publik                                   | (76,61 – 88,30)<br>B | 87,34<br>B                            | 100%                 |

**Tabel. 2.3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2024**

| Uraian  | Anggaran Tahun 2024 | Realisasi Anggaran Tahun 2024 | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2024 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Belanja operasional   | 7.033.869.834       | 6.734.828.247                 | 95,74%   | 0,95                  |
| Belanja Modal   | 198.240.650         | 191.092.760                   | 96,39%   | 0,96                  |
| Belanja subsidi   | -                   | -                             | -  | -                     |
| Belanja hibah   | -                   | -                             | -  | -                     |
| Belanja bantuan sosial  | -                   | -                             | -  | -                     |
| Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa | -                   | -                             | -  | -                     |
| Belanja tidak terduga   | -                   | -                             | -  | -                     |

Selanjutnya akan diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dengan posisi capaian tahun 2024.

**I. Sasaran Strategis : *Meningkatnya Keberdayaan Desa***

| No | INDIKATOR  | TARGET | REALISASI | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal                             | 100%   | 100%      | 100%      |
| 2  | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri                         | 93,27% | 98,31%    | 105,4%    |
| 3  | Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten | 11,01% | 11,89%    | 108 %     |

**1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**

Sejak Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 Kabupaten Minahasa sudah tidak lagi memiliki Desa Sangat Tertinggal maupun Desa Tertinggal atau 100% pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Minahasa terealisasi, tetapi karena indicator ini merupakan indicator kinerja outcome dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga indicator ini menjadi indicator kinerja utama Dinas PMD Kab. Minahasa.

**2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri**

Pembangunan secara normatif dimaksudkan untuk mengupayakan perubahan kehidupan masyarakat dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Namun, tujuan pembangunan seperti itu sering kali tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, hasil pembangunan sering kali berdampak negatif dan problematik bagi sebagian besar masyarakat. Meski diakui dalam beberapa hal pembangunan telah membawa dampak positif seperti kemajuan dan kemodernan, namun tidak sedikit pula persoalan dan permasalahan sosial muncul yang diakibatkan pembangunan. Pembangunan selama ini lebih didominasi oleh peran pemerintah yang besar sehingga wajar kalau kemudian pemerintah yang menjadi pelaku utama sekaligus manajer pembangunan tersebut sementara rakyat hanya sebagai objek. Begitu besarnya campur tangan pemerintah yang dalam kenyataannya tidak hanya berurusan dengan perencanaan program-program pembangunan, rekayasa sosial ekonomi, manajemen, administrasi, dan regulasi.

Sentralnya peran pemerintah dalam pembangunan ini sering kali mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan yang mencolok antar kelompok masyarakat. Karena pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan, tetapi juga penyebaran ekonomi, distribusi pendapatan, demokrasi, keberpihakan pada rakyat miskin, maka Paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat, merupakan sebuah konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan itu sendiri, menjadi pilihan yang paling rasional atau sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada saat ini. Konsep pembangunan ini mengarahkan pada penciptaan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki, dengan demikian pembangunan akan menjadi berhasil, efektif dan tepat sasaran.

Pembangunan yang berpihak pada rakyat pada dasarnya adalah untuk mencairkan sektoral yang kurang efektif dan efisien menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih komprehensif. Pemikiran yang demikian harus diikuti oleh inovasi agar masyarakat dapat ikut serta dalam membantu yang lemah dan mendorong yang kuat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, otonomi daerah yang secara hakekat pelaksanaannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, memberikan kesempatan lebih kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya dan membangun sesuai skala prioritas kebutuhan dan nilai-nilai kearifan lokal.

Untuk mendorong percepatan Pembangunan di Kabupaten Minahasa diperlukan adanya kemauan dalam diri masyarakat sendiri untuk berubah (inner will). Perubahan tersebut diantaranya peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan mendorong tumbuh kembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga dapat mempercepat peningkatan pengembangan Desa menuju Desa yang maju dan mandiri.

Untuk meningkatkan pengembangan desa menuju desa yang maju dan mandiri, Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai perencanaan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 telah menargetkan persentase peningkatan status desa mandiri (indiaktor kinerja ini juga merupakan indicator kinerja outcome dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) (pengukurannya yaitu Jumlah desa berkembang yg memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun (tahun sebelumnya 2023) / Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) x 100%), dengan target di tahun 2024 93,27% dengan realisasi 98,31% dengan capaian 105,4%.

Perhitungannya sebagai berikut:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Target Tahun 2023 | $\frac{69 \text{ desa berkembang}}{119 \text{ desa berkembang awal tahun (2020)}} \times 100 = 57,98\%$ |
|-------------------|---|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Realisasi Tahun 2023 | $\frac{109 \text{ desa berkembang}}{119 \text{ desa berkembang awal tahun (2020)}} \times 100 = 91,59\%$ |
|----------------------|--|

- Dengan capaian realisasi tahun 2023 adalah 157,9%

|                   |  |
|-------------------|--|
| Target Tahun 2024 | $\frac{111 \text{ desa}}{119 \text{ desa}} \times 100 = 93,27\%$ |
|-------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Realisasi Tahun 2024 | $\frac{117 \text{ desa}}{119 \text{ desa}} \times 100 = 98,31\%$ |
|----------------------|--|

- Dengan capaian realisasi tahun 2024 adalah 105,4%

*Tabel Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa*

| No | Klasifikasi Status Desa | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|----|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |                         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Desa Sangat Tertinggal  | 1     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2  | Desa Tertinggal         | 76    | 31   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3  | Desa Berkembang         | 138   | 161  | 119  | 67   | 29   | 10   | 2    |
| 4  | Desa Maju               | 12    | 31   | 77   | 97   | 93   | 53   | 38   |
| 5  | Desa Mandiri            | -     | -    | 31   | 63   | 105  | 164  | 187  |

Selanjutnya dapat diuraikan persentase Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2024 :

*Tabel Persentase Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa*

| No | Klasifikasi Status Desa | Tahun |
|----|-------------------------|-------|
|----|-------------------------|-------|

|   |                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                        | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  |
| 1 | Desa Sangat Tertinggal | 0,44        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2 | Desa Tertinggal        | 33,48       | 13,66       | -           | -           | -           | -           | -           |
| 3 | Desa Berkembang        | 60,79       | 70,93       | 52,42       | 29,52       | 12,78       | 4,41        | 0,88        |
| 4 | Desa Maju              | 5,29        | 13,66       | 33,92       | 42,73       | 40,97       | 23,35       | 16,74       |
| 5 | Desa Mandiri           | -           | -           | 13,66       | 27,75       | 46,26       | 72,25       | 82,38       |

Sebagai pembandingan, selanjutnya akan di tampilkan Indeks Desa Membangun Tingkat Nasional dari tahun 2019 s.d. tahun 2024.

*Tabel Klasifikasi Status Desa  
Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tingkat Nasional*

| <b>No</b> | <b>Klasifikasi Status Desa</b> | <b>Tahun</b> |             |             |             |             |             |
|-----------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                | <b>2019</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 1         | Desa Sangat Tertinggal         | 3536         | 2466        | 4985        | 4438        | 4382        | 3920        |
| 2         | Desa Tertinggal                | 17626        | 13961       | 12177       | 9234        | 6798        | 6021        |
| 3         | Desa Berkembang                | 38185        | 39866       | 38086       | 33892       | 28743       | 24516       |
| 4         | Desa Maju                      | 8647         | 11899       | 15324       | 20248       | 23025       | 23085       |
| 5         | Desa Mandiri                   | 840          | 1741        | 3278        | 6238        | 11456       | 17207       |

Berikut dapat diuraikan persentase Indeks Desa Membangun Tingkat Nasional dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2024 :

*Tabel Persentase Indeks Desa Membangun Tingkat Nasional*

| <b>No</b> | <b>Klasifikasi Status Desa</b> | <b>Tahun</b> |             |             |             |             |             |
|-----------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                | <b>2019</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|           |                                | <b>(%)</b>   | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  | <b>(%)</b>  |
| 1         | Desa Sangat Tertinggal         | 5,14         | 3,53        | 6,75        | 5,99        | 5,89        | 5,24        |
| 2         | Desa Tertinggal                | 25,61        | 19,96       | 16,49       | 12,47       | 9,14        | 8,05        |
| 3         | Desa Berkembang                | 55,47        | 57,01       | 51,57       | 45,77       | 38,63       | 32,80       |
| 4         | Desa Maju                      | 12,56        | 17,01       | 20,75       | 27,344      | 30,95       | 30,88       |
| 5         | Desa Mandiri                   | 1,22         | 2,49        | 4,44        | 8,42        | 15,40       | 23,02       |

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini, diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri.

Metode pengukuran atau indicator Indeks Desa Membangun terdiri dari 3 (tiga) indicator yaitu :

1. Ketahanan Sosial
  - Modal Sosial
  - Kesehatan
  - Pendidikan
  - Permukiman
2. Ketahanan Ekologi
  - Kualitas lingkungan
  - Potensi rawan bencana
  - Tanggap bencana
3. Ketahanan Ekonomi
  - Keberagaman produksi masyarakat desa
  - Tersedia pusat pelayanan perdagangan
  - Akses distribusi/logistic
  - Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan
  - Lembaga ekonomi
  - Keterbukaan wilayah

### **3. Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten**

Salah satu wujud nyata upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Minahasa, sekaligus perlombaan desa ini dijadikan sarana evaluasi dan pembinaan atas program/kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir.

Perlombaan Desa ini memfokuskan penilaian pada tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan pemerintahan Desa. Atau dengan kata lain sasaran penilaian adalah tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa bersama masyarakat dengan menitikberatkan pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat, kegotongroyongan dan keswadayaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tersebut, dilakukan penilaian terhadap tingkat perkembangan masyarakat Desa selama periode 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2022.

Indikator Penilaian dan Evaluasi terhadap perkembangan desa berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pemerintahan
- b. Bidang Kewilayahan
- c. Bidang Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2024, maka dapat diuraikan pemenang dalam perlombaan desa tersebut, sebagai berikut:

- Juara I, Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso
- Juara II, Desa Paslaten Kecamatan Kakas
- Juara III, Desa Ranootongkor Kecamatan Tombariri Timur
- Juara Harapan I, Desa Mokupa Kecamatan Tombariri
- Juara Harapan II, Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara
- Juara Harapan III, Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara

Selanjutnya dapat diuraikan pencapaian hasil indikator **Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten** sejak tahun 2019 s.d. tahun 2024.

Tabel Jumlah Desa Berprestasi di Kabupaten Minahasa  
Dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2024

| No.                           | TAHUN | JUMLAH DESA BERPRESTASI | KET  |
|-------------------------------|-------|-------------------------|--|
| 1.                            | 2019  | 6 Desa                  |  |
| 2.                            | 2020  | -                       | Perlombaan Desa tidak dilaksanakan karena COVID 19 |
| 3.                            | 2021  | 6 Desa                  | 1 Desa pernah juara di tahun 2019                  |
| 4.                            | 2022  | 6 Desa                  | 1 Desa pernah juara di tahun 2022                  |
| 5.                            | 2023  | 6 Desa                  |  |
| 6.                            | 2024  | 6 Desa                  | 1 Desa pernah juara di tahun 2019                  |
| JUMLAH                        |       | 30 Desa                 | 3 Desa pernah juara di tahun sebelumnya            |
| <b>TOTAL DESA BERPRESTASI</b> |       | <b>27 Desa</b>          | <b>30 desa – 3 desa = 27 desa (11,89%)</b>         |

Tabel Daftar Desa Berprestasi di Kabupaten Minahasa  
Dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2024

| No. | NAMA DESA BERPRESTASI | KECAMATAN             | TAHUN      | KET                          |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 1.  | Desa Leilem           | Kec. Sonder           | 2019       | Juara 1                      |
| 2.  | Desa Kanonang Satu    | Kec. Kawangkoan Barat | 2019       | Juara 2                      |
| 3.  | Desa Tonsealama       | Kec. Tondano Utara    | 2019, 2024 | Juara 3 2019, Harapan 2 2024 |
| 4.  | Desa Ranowangko       | Kec. Tombariri        | 2019       | Harapan 1                    |

| No. | NAMA DESA BERPRESTASI | KECAMATAN             | TAHUN      | KET                          |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 5.  | Desa Kamanga          | Kec. Tompaso          | 2019, 2021 | Harapan 2 2019, Juara 1 2021 |
| 6.  | Desa Kembes Satu      | Kec. Tombulu          | 2019       | Harapan 3                    |
| 7.  | Desa Walewangko       | Kec. Langowan Barat   | 2021       | Juara 2                      |
| 8.  | Desa Winebetan        | Kec. Langowan Selatan | 2021       | Juara 3                      |
| 9.  | Desa Tambala          | Kec. Tombariri        | 2021       | Harapan 1                    |
| 10. | Desa Wasian           | Kec. Kakas Barat      | 2021, 2022 | Harapan 2 2021, Juara 2 2022 |
| 11. | Desa Lalumpe          | Kec. Kombi            | 2021       | Harapan 3                    |
| 12. | Desa Kamanga Dua      | Kec. Tompaso          | 2022       | Juara 1                      |
| 13. | Desa Waleure          | Kec. Langowan Timur   | 2022       | Juara 3                      |
| 14. | Desa Touliang Oki     | Kec. Eris             | 2022       | Harapan 1                    |
| 15. | Desa Sawangan         | Kec. Tombulu          | 2022       | Harapan 2                    |
| 16. | Desa Tateli Dua       | Kec. Mandolang        | 2022       | Harapan 3                    |
| 17. | Desa Karondoran       | Kec. Langowan Timur   | 2023       | Juara 1                      |
| 18. | Desa Kasuratan        | Kec. Remboken         | 2023       | Juara 2                      |
| 19. | Desa Karumenga        | Kec. Langowan Utara   | 2023       | Juara 3                      |
| 20. | Desa Kembuan          | Kec. Tondano Utara    | 2023       | Harapan 1                    |
| 21. | Desa Kalasey Satu     | Kec. Mandolang        | 2023       | Harapan 2                    |
| 22. | Desa Ampreng          | Kec. Langowan Barat   | 2023       | Harapan 3                    |
| 23. | Desa Tolok Satu       | Kec. Tompaso          | 2024       | Juara 1                      |
| 24. | Desa Paslaten         | Kec. Kakas            | 2024       | Juara 2                      |
| 25. | Desa Ranootongkor     | Kec. Tombariri Timur  | 2024       | Juara 3                      |
| 26. | Desa Mokupa           | Kec. Tombariri        | 2024       | Harapan 1                    |
| 27. | Desa Toraget          | Kec. Langowan Utara   | 2024       | Harapan 3                    |

Selanjutnya akan diuraikan sasaran-sasaran program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

#### 1) Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Desa

| No. | INDIKATOR  | TARGET | REALISASI | % Capaian |
|-----|--|--------|-----------|-----------|
| 1   | Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa | 61%    | 55,5%     | 90,98%    |

Kegiatan fasilitasi desa dalam penataan wilayah dan kewenangan desa di tahun 2024, untuk penataan kewenangan desa sudah terlaksana dengan dibuatnya Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa di 227 desa sedangkan untuk penataan wilayah desa telah dilaksanakan kegiatan yang diikuti peserta dari 25 desa, atau dari target yang direncanakan yaitu 61% dengan realisasi 55,5% dengan capaian 90,98% dengan pengukuran sebagai berikut:

- Penataan kewenangan desa di 227 desa = 100% ( $227 / 227 \times 100\% = 100\%$ )
- Penataan wilayah desa di 25 desa = 11,01% ( $25 / 227 \times 100\% = 11,01\%$ )
- $100\% + 11,01\% = 111,01\% / 2 = 55,5\%$

Tabel Realisasi Perbandingan Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penataan Wilayah dan Kewenangan Desa

| No | INDIKATOR  | TARGET |      | REALISASI |       |
|----|--|--------|------|-----------|-------|
|    |  | 2023   | 2024 | 2023      | 2024  |
| 1  | Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa | 50%    | 61%  | 50%       | 55,5% |

Terkait dengan keberhasilan penataan kewenangan desa di 227 desa yang ada di Kab. Minahasa, karena adanya sosialisasi terkait kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.

2) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

| No. | INDIKATOR  | TARGET | REALISASI | % Capaian |
|-----|--|--------|-----------|-----------|
| 1   | Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik | 28,19% | 37,44%    | 132,8%    |
| 2.  | Persentase Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten      | 0,49%  | 0,57%     | 117,6%    |

a. *Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik*

Target persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik di tahun 2023 adalah 24,22% atau 55 desa dan hasil realisasi adalah 32,15% atau 73 desa dengan persentase capaian 132,74%. Di Tahun 2024 mengalami kenaikan dari target dalam dokumen perencanaan Dinas PMD yaitu 28,19% atau 64 desa terealisasi 37,44% atau 85 desa dengan capaian realisasi 132,8%. Perhitungan desa pengelolaan administrasi pemerintahan

yang baik adalah desa perutusan kecamatan atau desa yang menjadi juara lomba desa tingkat kecamatan. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel desa-desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik dari tahun 2019 s.d. 2024.

*Tabel Data Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik  
(Perwakilan Desa dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten)  
Tahun 2019 s.d. 2024*

| No | Kecamatan        | Desa |                     | Tahun            |
|----|------------------|------|---------------------|------------------|
| 1  | Kawangkoan Utara | 1    | Kiawa II Timur      | 2019, 2024       |
|    |                  | 2    | Kiawa I             | 2021             |
|    |                  | 3    | Kiawa I Barat       | 2023             |
| 2  | Kawangkoan       | 3    | Kanonang III        | 2019, 2024       |
|    |                  | 4    | Tondegesan I        | 2023             |
| 3  | Kawangkoan Barat | 5    | Kanonang I          | 2019             |
|    |                  | 6    | Ranolambot          | 2021             |
|    |                  | 7    | Tombasian Bawah     | 2022             |
|    |                  | 8    | Kanonang IV         | 2023             |
|    |                  | 9    | Tombasian Atas Satu | 2024             |
| 4  | Langowan Selatan | 10   | Rumbia              | 2019, 2024       |
|    |                  | 11   | Winebetan           | 2021             |
|    |                  | 12   | Temboan             | 2022             |
|    |                  | 13   | Atep                | 2023             |
| 5  | Langowan Timur   | 14   | Teep                | 2019, 2024       |
|    |                  | 15   | Wolaang             | 2021             |
|    |                  | 16   | Waleure             | 2022             |
|    |                  | 17   | Karondoran          | 2023             |
| 6  | Langowan Utara   | 18   | Walantakan          | 2019             |
|    |                  | 19   | Karumenga           | 2021, 2023       |
|    |                  | 20   | Toraget             | 2022, 2024       |
| 7  | Mandolang        | 21   | Tateli Dua          | 2019, 2022       |
|    |                  | 22   | Koha                | 2021             |
|    |                  | 23   | Kalasey Satu        | 2023             |
|    |                  | 24   | Agotey              | 2024             |
| 8  | Pineleng         | 25   | Sea I               | 2019, 2023       |
|    |                  | 26   | Winangun Atas       | 2021             |
|    |                  | 27   | Lotta               | 2022             |
|    |                  | 28   | Pineleng Dua        | 2024             |
| 9  | Tombulu          | 29   | Kembes Satu         | 2019, 2021, 2024 |
|    |                  | 30   | Sawangan            | 2022             |
|    |                  | 31   | Koka                | 2023             |
| 10 | Tombariri        | 32   | Ranowangko          | 2019             |
|    |                  | 33   | Tambala             | 2021             |
|    |                  | 34   | Poopo               | 2022             |
|    |                  | 35   | Sarani Matani       | 2023             |
|    |                  | 36   | Mokupa              | 2024             |

| No | Kecamatan       | Desa |                       | Tahun      |
|----|-----------------|------|-----------------------|------------|
| 11 | Tombariri Timur | 37   | Lemoh                 | 2019       |
|    |                 | 38   | Ranotongkor           | 2021, 2024 |
|    |                 | 39   | Lolah                 | 2022       |
|    |                 | 40   | Lemoh Barat           | 2023       |
| 12 | Sonder          | 41   | Leilem                | 2019       |
|    |                 | 42   | Talikuran             | 2021       |
|    |                 | 43   | Kolongan Atas Satu    | 2022       |
|    |                 | 44   | Sendangan             | 2023       |
|    |                 | 45   | Kauneran Satu         | 2024       |
| 13 | Kakas           | 46   | Wineru                | 2019, 2021 |
|    |                 | 47   | Pahaleten             | 2022       |
|    |                 | 48   | Paslaten              | 2023, 2024 |
| 14 | Kakas Barat     | 49   | Panasen               | 2019       |
|    |                 | 50   | Wasian                | 2021, 2022 |
|    |                 | 51   | Touliang              | 2023       |
|    |                 | 52   | Kalawiran             | 2024       |
| 15 | Remboken        | 53   | Tampusu               | 2019, 2022 |
|    |                 | 54   | Talikuran             | 2021       |
|    |                 | 55   | Kasuratan             | 2023       |
|    |                 | 56   | Parepei               | 2024       |
| 16 | Tompaso Barat   | 57   | Pinbabetengan Selatan | 2019       |
|    |                 | 58   | Tonsewer Selatan      | 2021       |
|    |                 | 59   | Tompaso II Utara      | 2022       |
|    |                 | 60   | Pinaesaan             | 2023       |
|    |                 | 61   | Touure Dua            | 2024       |
| 17 | Tompaso         | 62   | Kamanga               | 2019, 2021 |
|    |                 | 63   | Kamanga Dua           | 2022       |
|    |                 | 64   | Tempok Selatan        | 2023       |
|    |                 | 65   | Tolok Satu            | 2024       |
| 18 | Langowan Barat  | 66   | Kopiwangker           | 2019       |
|    |                 | 67   | Walewangko            | 2021       |
|    |                 | 68   | Tounelet              | 2022, 2024 |
|    |                 | 69   | Ampreng               | 2023       |
| 19 | Kombi           | 70   | Rerer                 | 2019       |
|    |                 | 71   | Lalumpe               | 2021       |
|    |                 | 72   | Kalawiran             | 2022       |
|    |                 | 73   | Ranowangko II         | 2023       |
|    |                 | 74   | Makalisung            | 2024       |
| 20 | Lembean Timur   | 75   | Watulaney             | 2019, 2021 |
|    |                 | 76   | Seretan               | 2022       |
|    |                 | 77   | Parentek              | 2023       |
|    |                 | 78   | Kapataran             | 2024       |
| 21 | Eris            | 79   | Maumbi                | 2019       |
|    |                 | 80   | Eris                  | 2021       |
|    |                 | 81   | Touliang Oki          | 2022       |
|    |                 | 82   | Watumea               | 2023       |
|    |                 | 83   | Ranomerut             | 2024       |
| 22 | Tondano Utara   | 84   | Tonsealama            | 2019, 2024 |

| No | Kecamatan | Desa |         | Tahun |
|----|-----------|------|---------|-------|
|    |           | 85   | Kembuan | 2023  |

*b. Persentase Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten*

Aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten minahasa pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan menghasilkan 6 orang aparatur pemerintah desa yang berprestasi dari 3.454 aparatur pemerintah desa atau 0,17%. Di tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan karena pandemic covid-19. Tahun 2022 dilaksanakan penilaian aparatur berprestasi tingkat kabupaten dan hasilnya 4 (empat) orang aparatur pemerintah desa yang berprestasi, 1 (satu) diantaranya pernah menjadi yang berprestasi di tahun 2019, sehingga sampai tahun 2022 sudah 9 (Sembilan) aparatur desa atau 0,26%, yang berprestasi tingkat kabupaten dari target yang direncanakan 0,33% atau 12 orang dengan tingkat capaian 78,78%. Dan di Tahun 2023 dari target 0,34% (12 orang) aparatur berprestasi terealisasi 0,43% atau 15 orang. Di Tahun 2024 dari target 0,49% (17 orang) aparatur berprestasi terealisasi 0,57% atau 20 orang. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel data aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat Kabupaten Minahasa.

*Tabel Data Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi  
Tingkat Kabupaten Minahasa  
Tahun 2019 s.d. 2024*

| No | Nama                      | Jabatan       | Alamat                                       | Ket                         |
|----|---------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| 1  | Frangky Singal            | Sekdes        | Desa Pinabetengan Selatan Kec. Tompaso Barat | Juara I 2019                |
| 2  | Army A. Kindangen         | Kaur Keuangan | Desa Kaima Kec. Remboken                     | Juara II 2019, Juara I 2022 |
| 3  | Stenly Sondakh            | Sekdes        | Desa Kanonang II Kec. Kawangkoan Barat       | Juara III 2019              |
| 4  | Yulius Dimpudus           | Kasi Pem      | Desa Tonsealama Kec. Tondano Utara           | Harapan I 2019              |
| 5  | Silvana K. Panambunan, SE | Sekdes        | Desa Kiawa Dua Kec. Kawangkoan Utara         | Harapan II 2019             |
| 6  | Stevira Parengkuan, SKM   | Sekdes        | Desa Wasian Kec. Kakas Barat                 | Harapan III 2019            |
| 7  | Heppy Walangitan          | Sekdes        | Desa Kanonang I Kec. Kawangkoan Barat        | Juara II 2022               |
| 8  | Alen Maindoka             | Kaur Umum     | Desa Kaweng Kec. Kakas                       | Juara III 2022              |
| 9  | Mariana Assa              | Sekdes        | Desa Ranomerut Kec. Eris                     | Harapan I 2022              |

| <b>No</b> | <b>Nama</b>            | <b>Jabatan</b> | <b>Alamat</b>                               | <b>Ket</b>                   |
|-----------|------------------------|----------------|---|------------------------------|
| 10        | Anggraeni Assa         | Sekdes         | Desa Touliang Oki Kec. Eris                 | Juara I 2023                 |
| 11        | Ricky Malvino Paat     | Sekdes         | Desa Leleko Kec. Remboken                   | Juara II 2023                |
| 12        | Irene Rima Koilam      | Sekdes         | Desa Pinabetengan Utara Kec. Tompasso Barat | Juara III 2023               |
| 13        | Jerry Hasani           | Sekdes         | Desa Tempok Selatan Kec. Tompasso           | Harapan I 2023, Juara I 2024 |
| 14        | Hansye D. R. Mokoginta | Sekdes         | Desa Kanonang Dua Kec. Kawangkoan Barat     | Harapan II 2023              |
| 15        | Alfredo Walewangko     | Sekdes         | Desa Lalumpe Kec. Kombi                     | Harapan III 2023             |
| 16        | Tianora M. Lasut       | Sekdes         | Desa Pineleng Satu Timur Kec. Pineleng      | Juara II 2024                |
| 17        | Victor Herru Mongkau   | Sekdes         | Desa Talikuran Kec. Remboken                | Juara III 2024               |
| 18        | Fermiyanto Sajow       | Kasi Pemdes    | Desa Kiawa Dua Barat Kec. Kawangkoan Utara  | Harapan I 2024               |
| 19        | Shintia Susanti Mokal  | Sekdes         | Desa Ranotongkor Timur Kec. Tombariri Timur | Harapan II 2024              |
| 20        | Noldi J. Pamaruntuan   | Sekdes         | Desa Suluan Kec. Tombulu                    | Harapan III 2024             |

### 3) Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa

| <b>No.</b> | <b>INDIKATOR</b>                                 | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>% Capaian</b> |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|
| 1          | Persentase BUMDesa Berprestasi Tingkat Kabupaten | 6,61%         | 7,92%            | 120%             |

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa melalui proses penilaian kinerja untuk menetapkan BUM Desa berprestasi, sudah dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan yang melakukan penilaian di wilayah masing-masing untuk menentukan BUM Desa yang akan diikutsertakan dalam penilaian di tingkat kabupaten. Penilaian di Tingkat Kabupaten Minahasa telah dilakukan untuk menentukan BUM Desa berprestasi sesuai target kinerja. Namun terdapat kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUM Desa, di antaranya masih kurangnya pemahaman dan dukungan pemerintah desa terhadap eksistensi dan kemajuan BUM Desa, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi pengurus BUM Desa. Selain itu, masih terbatasnya akses permodalan bagi pengembangan BUM Desa, yang saat ini masih sangat tergantung pada pemberian dana penyertaan desa

dalam APB Desa, namun seringkali justru belum memberikan ruang yang cukup bagi pendanaan BUM Desa. Oleh sebab itu tetap perlu dilakukan berbagai pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUM Desa, di antaranya melalui proses penilaian BUM Desa, serta upaya-upaya lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan Lomba BUM Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2024 telah dilaksanakan pada Triwulan ke IV (bulan Oktober), sebelum dilaksanakannya Lomba BUM Desa Tingkat Kabupaten terlebih dahulu dilaksanakan perlombaan BUM Desa di Tingkat Kecamatan yang berada di 22 Kecamatan. Dari 22 BUM Desa utusan kecamatan akan diambil 6 (enam) BUM Desa sebagai BUM Desa terbaik di tingkat Kabupaten. Sampai tahun 2023 BUM Desa yang berprestasi sudah berjumlah 15 BUM Desa atau 6,6% dan di tahun 2024 menjadi 18 BUM Desa yang berprestasi di tingkat kabupaten dan terealisasi 7,92% dari target 6,61% dengan capaian 120%. Selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut BUM Desa-BUM Desa Berprestasi di Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2024.

*Tabel BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2024*

| <b>NO</b> | <b>NAMA BUM DESA</b>    | <b>DESA</b>     | <b>KECAMATAN</b> | <b>KET</b>          |
|-----------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1.        | Makasiow                | Kayuuwi         | Kawangkoan Barat | 2019 (1), 2020 (1)  |
| 2.        | Metuari                 | Raranon         | Langowan Barat   | 2019 (2), 2023 (1)  |
| 3.        | Matuari                 | Sendangan       | Tompaso          | 2019 (3)            |
| 4.        | Pinulutan               | Pulutan         | Remboken         | 2020 (2)            |
| 5.        | Karondoran              | Lolah Tiga      | Tombariri Timur  | 2020 (3)            |
| 6.        | Suka Maju               | Raringis Utara  | Langowan Barat   | 2021 (1)            |
| 7.        | Esa Keter               | Kayuuwi Satu    | Kawangkoan Barat | 2021 (2), 2023 (H2) |
| 8.        | Punyata Waya            | Wasian          | Kakas Barat      | 2021 (3)            |
| 9.        | Esa Waya                | Sendangan       | Tompaso          | 2022 (1)            |
| 10.       | Sarana Sumber Sejahtera | Tonsealama      | Tondano Utara    | 2022 (2)            |
| 11.       | Abadi                   | Walantakan      | Langowan Utara   | 2022 (3)            |
| 12.       | Gagaran                 | Sinuian         | Remboken         | 2023 (2)            |
| 13.       | Esa Keter               | Tondegesan Satu | Kawangkoan       | 2023 (3)            |
| 14.       | Matuari                 | Sendangan       | Sonder           | 2023 (H1)           |
| 15.       | Damai                   | Mahembang       | Kakas            | 2023 (H3)           |
| 16.       | Sumallendo              | Ranolambot      | Kawangkoan Barat | 2024 (1)            |
| 17.       | Berkat Usaha            | Borgo           | Tombariri        | 2024 (2)            |
| 18.       | Padior                  | Talikuran       | Tompaso          | 2024 (3)            |

4) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

| <b>No.</b> | <b>INDIKATOR</b> | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>% Capaian</b> |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|

| No. | INDIKATOR  | TARGET | REALISASI | %<br>Capaian |
|-----|--|--------|-----------|--------------|
| 1   | Persentase Desa yang memiliki Usaha Ekonomi Masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan | 100%   | 100%      | 100%         |
| 2   | Persentase Desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG                                       | 14,97% | 14,97%    | 100%         |

*a. Persentase Desa yang memiliki Usaha Ekonomi Masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan*

Secara umum, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa tetap berjalan sesuai potensi yang ada, 100% setiap desa memiliki usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, ditemui bahwa masih terbatasnya usaha ekonomi yang sifatnya khusus, dan masih rentannya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Bencana non alam COVID-19 merupakan salah satu faktor yang cukup memberikan dampak signifikan terhadap terhambatnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Namun secara perlahan usaha ekonomi masyarakat mulai kembali berkembang, walaupun terdapat beberapa kendala yang ditemui seperti permodalan, kualitas produk serta faktor pemasaran. Oleh karena itu tetap perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten, misalnya melalui berbagai kegiatan sosialisasi untuk mempertemukan pelaku usaha dan perangkat daerah terkait, serta tentu saja unsur perbankan yang dapat dijadikan alternatif solusi terhadap pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi tentang eksistensi usaha ekonomi masyarakat guna lebih memahami permasalahan yang ditemui oleh pelaku usaha di desa guna diupayakan solusinya.

*b. Persentase Desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG*

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat desa, secara umum persentasinya dapat dicapai sesuai target. Namun terdapat beberapa kendala yang ditemui, di antaranya kurangnya minat dan pengetahuan pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai potensi di desa masing-masing. Selain itu, masih kurangnya perhatian Pemerintah Desa untuk memprioritaskan pengembangan

dan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui pengalokasian dana dalam APB Desa. Oleh karena itu, tetap diperlukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi tepat guna, termasuk di dalamnya keterlibatan dalam kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna yang digelar setiap tahun oleh Pemerintah Pusat. Selain itu perlu dilaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap peluang-peluang pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di desa-desa.

Target persentase desa yang memanfaatkan TTG di tahun 2023 adalah 14,09% atau 32 desa dengan realisasi target adalah 14,09%, sedangkan target di tahun 2024 adalah 14,97% atau 33 desa dengan realisasi adalah 14,97% dengan tingkat capaian 100%. Selanjutnya akan diuraikan desa-desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna desa sampai dengan tahun 2024.

*Tabel Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa sampai Tahun 2024*

| No | Kecamatan       | Desa                  | Jenis Alat                             | Fungsi   |
|----|-----------------|-----------------------|--|--|
| 1  | Kakas           | 1. Paslaten           | Pompa Air                              | Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan        |
|    |                 |                       | Mesin Cacah                            | Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik        |
| 2  | Kakas Barat     | 2. Kaweng             | Mesin Cacah                            | Mencacah tanah pertanian                             |
|    |                 | 3. Tountimomor        | Mesin Perontok Padi                    | Merontokkan Padi                                     |
|    |                 |                       | Mesin Penggiling                       | Menggiling Tepung Beras                              |
|    |                 | 4. Kalawiran          | Mesin Perontok Padi                    | Merontokkan Padi                                     |
|    |                 | 5. Touliang           | Mesin Perontok Padi                    | Merontokkan Padi                                     |
|    |                 | 6. Passo              | Mesin Perontok Padi                    | Merontokkan Padi                                     |
|    |                 | 7. Panasen            | Mesin Penggiling                       | Menggiling Tepung Beras                              |
|    |                 | Alat Peras            | Mempermudah dan Efektif Memeras Santan |  |
| 3  | Lembean Timur   | 8. Karor              | Alat Destilasi                         | Menyuling Minyak Cengkeh                             |
| 4. | Remboken        | 9. Pulutan            | Meja Putar                             | Membentuk Gerabah/Keramik                            |
|    |                 |                       | Mesin Aduk                             | Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik      |
| 5  | Tompaso         | 10. Tember            | Irigasi Pipa Pvc                       | Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi |
| 6. | Tondano Utara   | 11. Tonsealama        | Mesin Cacah                            | Mencacah Sampah                                      |
| 7. | Langowan Barat  | 12. Noongan           | Alat Destilasi                         | Menyuling Minyak Cengkeh                             |
| 8. | Tombulu         | 13. Kamangta          | Mesin Parut Dan Peras                  | Parut Kelapa Dan Peras Santan                        |
| 9. | Tombariri Timur | 14. Lemoh Barat       | Mesin Parut Dan Peras                  | Parut Kelapa Dan Peras Santan                        |
|    |                 | 15. Lemoh Timur       | Mesin Parut Dan Peras                  | Parut Kelapa Dan Peras Santan                        |
|    |                 |                       | Alat Pengolahan Bio Gas                | Biogas Utk Listrik(Kompur Gas & Listrik              |
|    |                 | 16. Ranotongkor Timur | Mesin Parut Dan Peras                  | Parut Kelapa Dan Peras Santan                        |
|    |                 | 17. Lemoh             | Mesin Perontok Padi                    | Perontok Padi  |
|    |                 |                       | Mesin Pengolahan Vco                   | Pengolahan Vco                                       |
|    |                 |                       | Mesin Pengolahan Pupuk Organik         | Pengolahan Pupuk Organik                             |
|    |                 | 18. Lemoh Uner        | Mesin Perontok Padi                    | Perontok Padi  |
|    |                 | 19. Lolah Satu        | Mesin Pipil Jagung                     | Perontok Jagung                                      |
|    |                 | 20. Lolah Tiga        | Mesin Pipil Jagung                     | Perontok Jagung                                      |
|    |                 | 21. Lolah Dua         | Mesin Giling Jagung                    | Menghancurkan Jagung/Memecah Biji Jagung             |
| 10 | Sonder          | 22. Timbukar          | Crown Cms-036 Alat Tanam               | Menanam Jagung Dan                                   |

| No | Kecamatan        | Desa                 | Jenis Alat                 | Fungsi   |
|----|------------------|----------------------|----------------------------|--|
|    |                  |                      | Benih                      | Pemupukan                                      |
|    |                  | 23. Kauneran Satu    | Alat Tanam Benih           | Menanam Jagung Dan Pemupukan                   |
|    |                  | 24. Talikuran Satu   | Alat Parut Kelapa          | Parut Kelapa                                   |
|    |                  |                      | Alat Perontok Padi         | Merontok Padi Menjadi Gabah                    |
|    |                  |                      | Pengolahan Biogas          | Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas         |
|    |                  | 25. Talikuran        | Alat Pembuat Mie           | Membuat/Mencetak Mie                           |
|    |                  | 26. Sendangan        | Alat Pembuat Mie           | Membuat/Mencetak Mie                           |
|    |                  | 27. Tincep           | Alat Pembuat Mie           | Membuat/Mencetak Mie                           |
|    |                  |                      | Alat Pemipil Jagung        | Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya         |
|    |                  |                      | Alat Perontok Padi         | Merontok Padi Menjadi Gabah                    |
|    |                  | 28. Tounelet         | Alat Pemipil Jagung        | Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya         |
|    |                  |                      | Alat Penanam Padi          | Mempermudah Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat       |
|    |                  |                      | Alat Giling Daging         | Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan |
|    |                  |                      | Pengolahan Biogas          | Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas         |
|    |                  |                      | Mesin Penanam Jagung       | Mempermudah Dlm Menanam Jagung/Lebih Cepat     |
| 11 | Kawangkoan Utara | 29. Kiawa Satu       | Mesin Pemipil              | Memipil Jagung                                 |
|    |                  | 30. Kiawa Satu Barat | Mesin Pemipil              | Memipil Jagung                                 |
| 12 | Tondano Utara    | 31. Kembuan          | Alat Penyulingan Asap Cair | Membuat Asap Cair                              |
| 13 | Eris             | 32. Tandengan Satu   | Mesin Cukur & Peras Kelapa | Untuk mencukur dan memeras kelapa              |
| 14 | Langowan Barat   | 33. Tounelet         | Alat Penyulingan Nilam     | Menghasilkan minyak nilam                      |

#### 5) Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa

| No. | INDIKATOR   | TARGET | REALISASI | % Capaian |
|-----|---|--------|-----------|-----------|
| 1   | Persentase Desa yang melakukan kerja sama   | 26,43% | 32,59%    | 123,3%    |
| 2   | Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama antar Desa  | 61     | 74        | 121,3%    |
| 3   | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | 2      | 17        | 850%      |

##### a. Persentase Desa yang melakukan kerja sama

Persentase jumlah desa yang melakukan kerjasama tahun 2024 melebihi target yang direncanakan, yakni 32,59% dari target 26,43% (capaian 123,3%), secara khusus ditunjang dengan adanya program pembangunan

kawasan perdesaan prioritas MAPALUS di Kecamatan Langowan Barat yang menjadi salah satu kawasan prioritas Pemerintah Pusat di tahun 2024 ini.

Sejalan dengan itu, secara umum bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa telah melakukan sosialisasi/pembinaan/ pendampingan kepada 227 desa se-Kabupaten Minahasa dalam hal kerjasama desa, baik itu kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Di tahun 2024 ini, desa-desa di Kabupaten Minahasa melakukan kerjasama dengan media massa dalam hal sosialisasi/publikasi kegiatan desa; serta kerjasama dengan PT Imtek Media Data dalam hal penyediaan layanan server *cloud* aplikasi sistem keuangan desa *online*.

Ke depan, agar dipertimbangkan penyediaan server oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk server aplikasi siskeudes *online* dan aplikasi sipades. Di samping itu, kerjasama antar desa dalam bentuk pendirian BUM Desa Bersama agar lebih digalakkan.

*b. Jumlah Desa yang Terasilitasi dalam Kerja Sama antar Desa*

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa tahun 2024 berjumlah 74 desa, melebihi target yang direncanakan dari target 61 desa dengan capaian 121,3%.

61 desa merupakan desa-desa yang melakukan kerjasama di tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun 2024 ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui tim monev program pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Minahasa.

Namun demikian, secara umum bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa telah melakukan sosialisasi/pembinaan/ pendampingan kepada 227 desa se-Kabupaten Minahasa dalam hal kerjasama desa, baik itu kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga.

*Tabel Data Kerjasama Antar Desa sampai Tahun 2024*

| No. | KECAMATAN     |   | NAMA DESA                 | KERJASAMA DENGAN DESA                              | BIDANG KERJASAMA                           |
|-----|---------------|---|---------------------------|--|--|
| 1   | TOMPASO BARAT | 1 | DESA TONSEWER             | DESA TONSEWER SELATAN                              | BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH |
|     |               | 2 | DESA TONSEWER SELATAN     | DESA TONSEWER                                      | BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH |
|     |               | 3 | DESA PINABETENGAN         | DESA PINABETENGAN UTARA, DESA PINABETENGAN SELATAN | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH              |
|     |               | 4 | DESA PINABETENGAN UTARA   | DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN SELATAN       | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH              |
|     |               | 5 | DESA PINABETENGAN SELATAN | DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN UTARA         | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH              |
|     |               | 6 | DESA TOUURE               | DESA TOUURE DUA                                    | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH              |
|     |               | 7 | DESA TOUURE DUA           | DESA TOUURE  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH              |

| No. | KECAMATAN        |    | NAMA DESA                | KERJASAMA DENGAN DESA  | BIDANG KERJASAMA   |
|-----|------------------|----|--------------------------|--|--|
| 2   | KOMBI            | 8  | DESA KOLONGAN            | DESA KOLONGAN SATU   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 9  | DESA KOLONGAN SATU       | DESA KOLONGAN  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 10 | DESA RERER               | DESA RERER SATU  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 11 | DESA RERER SATU          | DESA RERER   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
| 3   | KAKAS            | 12 | DESA WINERU              | DESA MAKALELON   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 13 | DESA MAKALELON           | DESA WINERU  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 14 | DESA SENDANGAN           | DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET           | KEAMANAN DAN KETERTIBAN                                      |
|     |                  | 15 | DESA PASLATEN            | DESA SENDANGAN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET          | KEAMANAN DAN KETERTIBAN                                      |
|     |                  | 16 | DESA PAHALETEN           | DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET           | KEAMANAN DAN KETERTIBAN                                      |
|     |                  | 17 | DESA TALIKURAN           | DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TOUNELET           | KEAMANAN DAN KETERTIBAN                                      |
|     |                  | 18 | DESA TOUNELET            | DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN          | KEAMANAN DAN KETERTIBAN                                      |
| 4   | REMBOKEN         | 19 | DESA KAIMA               | DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |
|     |                  | 20 | DESA SENDANGAN           | DESA KAIMA, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO      | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |
|     |                  | 21 | DESA TIMU                | DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |
|     |                  | 22 | DESA TALIKURAN           | DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA PASLATEN, DESA LELEKO      | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |
|     |                  | 23 | DESA PASLATEN            | DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA LELEKO     | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |
|     |                  | 24 | DESA LELEKO              | DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |
| 5   | KAWANGKOAN BARAT | 25 | DESA TOMBASIAN ATAS      | DESA TOMBASIAN ATAS SATU, DESA TOMBASIAN BAWAH                         | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 26 | DESA TOMBASIAN ATAS SATU | DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN BAWAH                              | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 27 | DESA TOMBASIAN BAWAH     | DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN ATAS SATU                          | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 28 | DESA KANONANG II         | DESA KANONANG IV, DESA KANONANG V                                      | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 29 | DESA KANONANG IV         | DESA KANONANG II, DESA KANONANG V                                      | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 30 | DESA KANONANG V          | DESA KANONANG II, DESA KANONANG IV                                     | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 31 | DESA KAYUUWI             | DESA KAYUUWI   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 32 | DESA KAYUUWI SATU        | DESA KAYUUWI SATU  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
| 6   | LANGOWAN TIMUR   | 33 | DESA AMONGENA I          | DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG                      | PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN                                   |
|     |                  | 34 | DESA AMONGENA II         | DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG                       | PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN                                   |
|     |                  | 35 | DESA AMONGENA III        | DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA WOLAANG                        | PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN                                   |
|     |                  | 36 | DESA WOLAANG             | DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III                   | PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN                                   |
| 7   | TOMBARIRI TIMUR  | 37 | DESA LOLAH               | DESA LOLAH I, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III                            | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 38 | DESA LOLAH I             | DESA LOLAH, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III                              | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 39 | DESA LOLAH II            | DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH III                               | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |
|     |                  | 40 | DESA LOLAH III           | DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH II                                | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                                |

| No. | KECAMATAN             |                   | NAMA DESA  | KERJASAMA DENGAN DESA  | BIDANG KERJASAMA  |
|-----|-----------------------|-------------------|--|--|---|
| 8   | PINELENG              | 41                | DESA PINELENG I  | DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                             |
|     |                       | 42                | DESA PINELENG II   | DESA PINELENG DUA INDAH, DESA PINELENG I   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                             |
|     |                       |                   |  | DESA PINELENG DUA INDAH, DESA LOTTA  | PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN                                |
|     |                       | 43                | DESA PINELENG DUA INDAH                                      | DESA PINELENG I, DESA PINELENG II  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                             |
|     |                       |                   |  | DESA PINELENG II, DESA LOTTA   | PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN                                |
|     |                       | 44                | DESA LOTTA   | DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH  | PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN                                |
|     |                       | 45                | DESA SEA   | DESA SEA I   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                             |
|     |                       | 46                | DESA SEA I   | DESA SEA   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                             |
|     |                       | 47                | DESA SEA II  | DESA SEA TUMPENGAN   | PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA                              |
|     |                       | 48                | DESA SEA TUMPENGAN   | DESA SEA II  | PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA                              |
| 49  | DESA KALI             | DESA KALI SELATAN | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |  |   |
| 50  | DESA KALI SELATAN     | DESA KALI         | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN |  |   |
| 9   | LANGOWAN SELATAN      | 51                | DESA ATEP  | DESA ATEP SATU   | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                             |
|     |                       | 52                | DESA ATEP SATU   | DESA ATEP  | PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH                             |
| 10  | LANGOWAN UTARA        | 53                | DESA TEMPANG   | DESA TEMPANG III   | KEAMANAN DAN KETERTIBAN                                   |
|     |                       |                   |  | DESA PARENTEK  | PEMBELAJARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PROMOSI WISATA |
| 54  | DESA TEMPANG III      | DESA TEMPANG      | KEAMANAN DAN KETERTIBAN                                      |  |   |
| 11  | LANGOWAN TIMUR        | 55                | DESA TORAGET   | DESA WALANTAKAN, DESA KARUMENGA  | BIDANG KEAMANAN   |
|     |                       | 56                | DESA WALANTAKAN  | DESA TORAGET, DESA KARUMENGA   | BIDANG KEAMANAN   |
|     |                       | 57                | DESA KARUMENGA   | DESA TORAGET, DESA WALANTAKAN  | BIDANG KEAMANAN   |
| 12  | LEMBEAN TIMUR         | 58.               | DESA PARENTEK  | DESA SEA TUMPENGAN   | PEMBELAJARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PROMOSI WISATA |
| 13. | LANGOWAN BARAT        | 59                | DESA KOYAWAS   | DESA KOYAWAS, DESA WALEWANGKO, DESA NOONGAN, DESA RARINGIS, DESA AMPRENG, DESA TUMARATAS, DESA PASLATEN, DESA LOWIAN, DESA TOUNELET, DESA KOPIWANGKER, DESA NOONGAN DUA, DESA NOONGAN TIGA, DESA TUMARATAS DUA, DESA RARANON, DESA RARINGIS UTARA, DESA RARINGIS SELATAN (SELURUH DESA DI KEC. LANGOWAN BARAT) | MENUNJANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS         |
|     |                       | 60                | DESA WALEWANGKO  |  |   |
|     |                       | 61                | DESA NOONGAN   |  |   |
|     |                       | 62                | DESA RARINGIS  |  |   |
|     |                       | 63                | DESA AMPRENG   |  |   |
|     |                       | 64                | DESA TUMARATAS   |  |   |
|     |                       | 65                | DESA PASLATEN  |  |   |
|     |                       | 66                | DESA LOWIAN  |  |   |
|     |                       | 67                | DESA TOUNELET  |  |   |
|     |                       | 68                | DESA KOPIWANGKER   |  |   |
|     |                       | 69                | DESA NOONGAN DUA   |  |   |
|     |                       | 70                | DESA NOONGAN TIGA  |  |   |
| 71  | DESA TUMARATAS DUA    |                   |  |  |   |
| 72  | DESA RARANON          |                   |  |  |   |
| 73  | DESA RARINGIS UTARA   |                   |  |  |   |
| 74  | DESA RARINGIS SELATAN |                   |  |  |   |

*Tabel Data Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sampai Tahun 2024*

| NO | URAIAN                | KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA | BIDANG KERJASAMA   | TAHUN                  |
|----|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| 1  | Desa se Kab. Minahasa | Insan Pers                         | Publikasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa | 2021, 2022, 2023, 2024 |

c. *Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya*

Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan yakni 17 desa, meliputi Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur yang melakukan kerjasama di bidang Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Promosi Wisata) dengan Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng (Desa Sea Tumpengan di tahun-tahun sebelumnya juga sudah melaksanakan kerja sama dengan Desa Sea II dalam Bidang Penggunaan Lahan Olahraga), dan 16 desa di Kecamatan Langowan Barat di bidang kerja sama menunjang Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas. Jumlah ini melebihi target perencanaan yaitu 2 desa.

Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng dan Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur berinisiatif melakukan kerjasama tukar menukar informasi sekaligus promosi keunggulan desa masing-masing, dimana Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng merupakan desa yang dinilai berkinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menjadi narasumber bagi Pemerintah Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur. Sebaliknya, kerjasama ini menjadi ajang bagi Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur untuk mempromosikan wisata desa berupa wisata pantai yang terkenal di kawasan pantai timur Minahasa.

Pada sisi lain, Pemerintah Pusat telah menetapkan kawasan perdesaan di Kecamatan Langowan Barat sebagai salah satu kawasan prioritas Pemerintah Pusat, sehingga program ini menjadi dasar bagi 16 desa di Kecamatan Langowan Barat untuk melakukan kerjasama dalam menunjang pembangunan kawasan perdesaan MAPALUS, antara lain melalui pendirian BUM Desa Bersama. Sampai saat ini, desa-desa di Kecamatan Langowan Barat telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa untuk pendirian BUM Desa Bersama Kecamatan Langowan Barat.

6) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

| No. | INDIKATOR   | TARGET | REALISASI | %<br>Capaian |
|-----|---|--------|-----------|--------------|
| 1   | Persentase Ketersediaan Dokumen Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa yang Berkualitas | 100%   | 100%      | 100%         |

| No. | INDIKATOR   | TARGET | REALISASI | %<br>Capaian |
|-----|---|--------|-----------|--------------|
| 2   | Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | 227    | 227       | 100%         |
| 3.  | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik        | 90,60% | 90,60%    | 100%         |

*a. Persentase Ketersediaan Dokumen Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa yang Berkualitas*

Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas di tahun 2024 mencapai skor maksimal yaitu 100%, dalam artian 227 desa di Kabupaten Minahasa telah menyusun dan memiliki dokumen pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan dokumen laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 1 Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian persentase maksimal ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas karena optimalisasi pembinaan dan pendampingan bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa terhadap pengelolaan keuangan desa di 227 desa, antara lain berupa penyusunan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan (penyusunan APB Desa), pelaksanaan (termasuk penatausahaan dan pembayaran pajak, serta pelaksanaan program/kegiatan fisik maupun nonfisik), sampai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

*b. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*

Desa-desanya yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tahun 2024 meliputi seluruh desa di Kabupaten Minahasa / 227 desa (100%). Terfasilitasinya seluruh desa di Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa bisa dilihat dari ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas yang dimiliki oleh 227 desa dan tersalurnya dana transfer desa (ADD, Dana Desa dan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024) kepada 227 desa.

Di samping itu, Bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa telah melaksanakan/memfasilitasi/mengkoordinasikan beberapa kegiatan terkait

pengelolaan keuangan dan aset desa seperti monitoring dan evaluasi serta *coaching clinic* pengelolaan keuangan desa di kecamatan dan desa se-Kabupaten Minahasa, rapat koordinasi program pemberdayaan masyarakat dan desa, bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan aplikasi siskeudes dan sipades, bimbingan teknis penyusunan APB Desa TA 2025 di tingkat kecamatan, workshop siskeudes bagi operator siskeudes di tingkat kabupaten, dll.

c. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik meliputi variabel kondisi kantor desa, peralatan kantor, jaringan internet, dan sarana prasarana kantor desa.

Di tahun 2024, cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mencapai 90,96%. Yang menjadi kendala untuk meningkatkan persentase cakupan sarana prasarana dimaksud adalah ketersediaan jaringan internet yang tidak merata di 227 desa. Padahal kondisi era digital saat ini mensyaratkan ketersediaan jaringan internet sampai ke seluruh desa di Kabupaten Minahasa. Kendala ini dapat diatasi dengan penganggaran pendirian tower jaringan internet atau langganan internet dalam APBD Kabupaten Minahasa.

*Tabel Sarana Prasarana di Desa Tahun 2024*

| NO | KECAMATAN | DESA |                | KONDISI KANTOR DESA |               | PERALATAN KANTOR | JARINGAN INTERNET | SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll) |
|----|-----------|------|----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|    |           |      |                | KONDISI BAIK        | KONDISI RUSAK |                  |                   |  |
| 1. | Eris      | 1    | Telap          | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |           | 2    | Watumea        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 3    | Eris           | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |           | 4    | Maumbi         | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 5    | Tandengan      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 6    | Ranomerut      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 7    | Touliang Oki   | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |           | 8    | Tandengan Satu | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 2  | Kombi     | 9    | Tulap          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 10   | Lalumpe        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 11   | Kayubesi       | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |           | 12   | Ranowangko II  | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 13   | Kombi          | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |           | 14   | Sawangan       | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 15   | Kolongan       | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 16   | Rerer          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 17   | Kinaleosan     | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 18   | Makalisung     | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |           | 19   | Kalawiran      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 20   | Kolongan I     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 21   | Rerer I        | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 22   | Kapataran      | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 23   | Seretan        | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 24   | Atep Oki       | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |

| NO | KECAMATAN      | DESA |                 | KONDISI KANTOR DESA |               | PERALATAN KANTOR | JARINGAN INTERNET | SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll) |
|----|----------------|------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|    |                |      |                 | KONDISI BAIK        | KONDISI RUSAK |                  |                   |  |
|    |                | 25   | Karor           | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 26   | Kaleosan        | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 27   | Watulaney       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 28   | Kayuroya        | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 29   | Seretan Timu    | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 30   | Parentek        | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 31   | Kapataran Satu  | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 32   | Watulaney Amian | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
| 4. | Kakas          | 33   | Kayuatu         | ---                 | ---           | √                | ---               | √  |
|    |                | 34   | Wineru          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 35   | Rinondor        | ---                 | ---           | √                | ---               | √  |
|    |                | 36   | Sendangan       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 37   | Pahaleten       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 38   | Talikuran       | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 39   | Tounelet        | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 40   | Paslaten        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 41   | Kaweng          | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 42   | Toulimembet     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 43   | Makalelon       | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 44   | Tumpa'an        | ---                 | ---           | √                | ---               | √  |
|    |                | 45   | Mahembang       | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
| 5. | Tompaso        | 46   | Tember          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 47   | Kamanga         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 48   | Sendangan       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 49   | Talikuran       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 50   | Tempok          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 51   | Liba            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 52   | Tolok           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 53   | Kamanga II      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 54   | Tempok Selatan  | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 55   | Tolok Satu      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 6. | Remboken       | 56   | Kasuratan       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 57   | Parepei         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 58   | Pulutan         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 59   | Sinui'an        | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 60   | Kaima           | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 61   | Sendangan       | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 62   | Timu            | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 63   | Talikuran       | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 64   | Tampusu         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 65   | Paslaten        | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 66   | Leleko          | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
| 7. | Langowan Timur | 67   | Wolaang         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 68   | Teep            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 69   | Karondoran      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 70   | Waleure         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 71   | Amongena I      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 72   | Amongena II     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 73   | Sumarayar       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 74   | Amongena III    | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
| 8. | Langowan Barat | 75   | Koyawas         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 76   | Walewangko      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 77   | Noongan         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 78   | Raringis        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 79   | Ampreng         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 80   | Tumaratas       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 81   | Paslaten        | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |                | 82   | Lowian          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 83   | Tounelet        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 84   | Kopiwangker     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 85   | Noongan Dua     | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 86   | Noongan Tiga    | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 87   | Tumaratas Dua   | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 88   | Raranon         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |                | 89   | Raringis Utara  | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |

| NO  | KECAMATAN        | DESA |                     | KONDISI KANTOR DESA |               | PERALATAN KANTOR | JARINGAN INTERNET | SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll) |
|-----|------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|     |                  |      |                     | KONDISI BAIK        | KONDISI RUSAK |                  |                   |  |
|     |                  | 90   | Raringis Selatan    | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 9.  | Sonder           | 91   | Leilem              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 92   | Kolongan Atas       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 93   | Tounelet            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 94   | Talikuran           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 95   | Kauneran            | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 96   | Sendangan           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 97   | Rambunan            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 98   | Sawangan            | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 99   | Tincep              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 100  | Timbukar            | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 101  | Leilem Dua          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 102  | Leilem Tiga         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 103  | Kolongan Atas 2     | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 104  | Kauneran Satu       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 105  | Rambunan Amian      | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 106  | Sendangan Satu      | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 107  | Talikuran Satu      | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 108  | Tounelet Satu       | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 109  | Kolongan Atas Satu  | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 10. | Kawangkoan       | 110  | Tondegesan          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 111  | Kanonang III        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 112  | Tondegesan I        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 113  | Tondegesan II       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 11. | Pineleng         | 114  | Pineleng I          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 115  | Pineleng II         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 116  | Sea I               | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 117  | Sea II              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 118  | Winangun Atas       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 119  | Warembungan         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 120  | Sea                 | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 121  | Kali                | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 122  | Kali Selatan        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 123  | Pineleng Dua Indah  | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 124  | Lotta               | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 11. | Pineleng         | 125  | Sea Mitra           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 126  | Sea Tumpengan       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 127  | Pineleng Satu Timur | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 12. | Tombulu          | 128  | Kembes II           | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 129  | Kembes I            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 130  | Tombuluan           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 131  | Koka                | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 132  | Suluan              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 133  | Kamangta            | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 134  | Sawangan            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 135  | Rumengkor           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 136  | Tikela              | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 137  | Rumengkor Satu      | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 138  | Rumengkor Dua       | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
| 13. | Tombariri        | 139  | Kumu                | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 140  | Teling              | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 141  | Poopoh              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 142  | Ranowangko          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 143  | Senduk              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 144  | Pinasungkulan       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 145  | Mokupa              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 146  | Sarani Matani       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 147  | Borgo               | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 148  | Tambala             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 14. | Tondano Utara    | 149  | Tonseal Lama        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 150  | Kembuan             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 151  | Kembuan Satu        | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
| 15. | Langowan Selatan | 152  | Palamba             | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 153  | Atep                | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 154  | Manembo             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |

| NO  | KECAMATAN        | DESA |                     | KONDISI KANTOR DESA |               | PERALATAN KANTOR | JARINGAN INTERNET | SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll) |
|-----|------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|     |                  |      |                     | KONDISI BAIK        | KONDISI RUSAK |                  |                   |  |
|     |                  | 155  | Temboan             | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 156  | Rumbia              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 157  | Winebetan           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 158  | Kaayuran Atas       | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 159  | Kaayuran Bawah      | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 160  | Kawatak             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 161  | Atep Satu           | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
| 16. | Langowan Utara   | 162  | Walantakan          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 163  | Taraitak            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 164  | Karumenga           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 165  | Toraget             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 166  | Tempang             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 167  | Tempang II          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 168  | Tempang III         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 169  | Taraitak Satu       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 17. | Kakas Barat      | 170  | Wasian              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 171  | Panasen             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 172  | Tountimomor         | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 173  | Totolan             | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 174  | Passo               | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 175  | Kalawiran           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 176  | Touliang            | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 177  | Simbel              | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 178  | Wailang             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 179  | Bukittinggi         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 18. | Kawangkoan Utara | 180  | Kiawa Satu          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 181  | Kiawa Satu Utara    | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 182  | Kiawa Satu Barat    | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 183  | Kiawa Dua           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 184  | Kiawa Dua Timur     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 185  | Kiawa Dua Barat     | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
| 19. | Kawangkoan Barat | 186  | Kayuuwi             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 187  | Kayuuwi Satu        | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 188  | Kanonang Satu       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 189  | Kanonang Dua        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 190  | Kanonang Empat      | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 191  | Kanonang Lima       | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 192  | Tombasian Atas      | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 193  | Tombasian Atas Satu | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 194  | Tombasian Bawah     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 195  | Ranolambot          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 20. | Mandolang        | 196  | Kalasey Satu        | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 197  | Kalasey Dua         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 198  | Tateli              | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 199  | Tateli Weru         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 200  | Tateli Satu         | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 201  | Tateli Dua          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 202  | Tateli Tiga         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 203  | Koha                | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 204  | Koha Barat          | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 205  | Koha Timur          | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 206  | Koha Selatan        | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|     |                  | 207  | Agotey              | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
| 21. | Tombariri Timur  | 208  | Lemoh               | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 209  | Lemoh Barat         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 210  | Lemoh Timur         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 211  | Lemoh Uner          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 212  | Lolah               | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 213  | Lolah Satu          | ---                 | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 214  | Lolah Dua           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 215  | Lolah Tiga          | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 216  | Ranotongkor         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 217  | Ranotongkor Timur   | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
| 22. | Tompaso Barat    | 218  | Pinaesaan           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|     |                  | 219  | Tompaso II          | ---                 | √             | √                | √                 | √  |

| NO | KECAMATAN | DESA |                      | KONDISI KANTOR DESA |               | PERALATAN KANTOR | JARINGAN INTERNET | SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll) |
|----|-----------|------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|    |           |      |                      | KONDISI BAIK        | KONDISI RUSAK |                  |                   |  |
|    |           | 220  | Tompaso II Utara     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 221  | Pinabetengan Utara   | ---                 | √             | √                | √                 | √  |
|    |           | 222  | Pinabetengan         | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 223  | Pinabetengan Selatan | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 224  | Tonsewer             | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 225  | Tonsewer Selatan     | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 226  | Touure               | √                   | ---           | √                | √                 | √  |
|    |           | 227  | Touure Dua           | √                   | ---           | √                | √                 | √  |

7) Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan serta Penyelenggaraan Musyawarah Desa

| No. | INDIKATOR   | TARGET | REALISASI | % Capaian |
|-----|---|--------|-----------|-----------|
| 1   | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkualitas | 100%   | 100%      | 100%      |

Dalam hal perencanaan pembangunan desa, desa wajib melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes) dan wajib menyusun dokumen perencanaan desa termasuk menyusun perencanaan APB Desa setiap tahun sebagai pedoman merealisasikan keuangan yang dikelola oleh desa. Dokumen APB Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk tahun 2024, semua desa (227 desa) telah menyampaikan dokumen dimaksud di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya semua desa telah menyampaikan dokumen-dokumen dimaksud.

8) Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

| No. | INDIKATOR   | TARGET | REALISASI | % Capaian |
|-----|---|--------|-----------|-----------|
| 1   | Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa | 100%   | 100%      | 100%      |
| 2   | Persentase LPM Berprestasi  | 4,81%  | 5,18%     | 117,4%    |
| 3   | Persentase PKK Aktif  | 100%   | 100%      | 100%      |

a. *Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa*

Keterlibatan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menunjang program pembangunan di desa tercapai 100%, hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan program perencanaan kegiatan meliputi musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang desa dan musyawarah desa (musdes). LKD yang terlibat antara lain LPM dan PKK.

*b. Persentase LPM Berprestasi*

LPM Berprestasi sejak Tahun 2019 berjumlah 4 LPM atau 1,48%, dan di Tahun 2020 dan 2021 tidak ada penambahan karena adanya pandemic covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan. Di Tahun 2022 LPM Berprestasi berjumlah 7 LPM (2,59%) dan Di Tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian LPM Berprestasi, dan total LPM yang berprestasi sampai Tahun 2023 adalah 14 LPM atau 5,18% dari target yang direncanakan yaitu 10 LPM atau 3,70% dengan tingkat capaian 140%. Di Tahun 2024 pelaksanaan LPM Berprestasi tidak dilaksanakan dan sesuai target dalam dokumen perencanaan SKPD di tahun 2024 adalah 4,81% (13 LPM), sehingga posisi sampai akhir Tahun 2024 persentase LPM Berprestasi di Kab. Minahasa adalah 5,18% (14 LPM) dengan tingkat capaian 117,4%.

*Tabel LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa  
Tahun 2019 s.d. 2024*

| <b>NO</b> | <b>LPM DESA/KELURAHAN</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>KETERANGAN</b>       |
|-----------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 1         | LPM Desa Tonsealama       | Tondano Utara    | 2019 (I),<br>2023 (HII) |
| 2         | LPM Desa Kayuwi           | Kawangkoan Barat | 2019 (II)               |
| 3         | LPM Desa Lemoh Barat      | Tombariri Timur  | 2019 (III)              |
| 4         | LPM Kelurahan Rinegetan   | Tondano Barat    | 2019 (TKI)              |
| 5         | LPM Desa Tombasian Bawah  | Kawangkoan Barat | 2022 (I)                |
| 6         | LPM Desa Tempok Selatan   | Tompaso          | 2022 (II)               |
| 7         | LPM Desa Ampreng          | Langowan Barat   | 2022 (III)              |
| 8         | LPM Desa Kiawa II Timur   | Kawangkoan Utara | 2022 (HI)               |
| 9         | LPM Desa Sarani Matani    | Tombariri        | 2022 (HII)              |
| 10        | LPM Desa Kamanga Dua      | Tompaso          | 2023 (I)                |
| 11        | LPM Desa Tumaratas        | Langowan Barat   | 2023 (II)               |
| 12        | LPM Desa Watulaney        | Lembean Timur    | 2023 (III)              |
| 13        | LPM Desa Kanonang Lima    | Kawangkoan Barat | 2023 (HI)               |
| 14        | LPM Desa Ranomerut        | Eris             | 2023 (HIII)             |

*c. Persentase PKK Aktif*

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa terdiri dari 270 TP PKK desa/kelurahan, 25 TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten Minahasa (100% aktif).

Gerakan PKK dalam setiap aktifitas melalui pembinaan dan pemberdayaan keluarga menjadi dasar keterlibatan yang bersifat strategis dalam membangun dan memperkuat kemitraan. Peranan perempuan dalam PKK kedepan dipandang semakin strategis. Tantangan berat yang dihadapi kedepan dalam era globalisasi adalah laju pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan.

Tim Penggerak PKK sebagai pengelola gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam mendukung pembangunan, memiliki kader dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan, dan untuk TP PKK di Kabupaten Minahasa mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan berperan aktif dalam usaha penggerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

## II. Sasaran Strategis : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah*

| No. | INDIKATOR  | TARGET                        | REALISASI                     | % Capaian |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1   | Tingkat Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah | Baik (B)                      |                               |           |
| 2   | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik                         | (76,61-88,30)<br>Baik (3 / B) | (76,61-88,30)<br>Baik (3 / B) | 100       |

### 1. Tingkat Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk Tahun 2024 masih dalam tahap penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa

### 2. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Indeks kepuasan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Minahasa di Tahun 2024 adalah Semester I Nilai Persepsi 4 dengan Mutu Pelayanan **Sangat Baik (88,88)**, dan Semester II Nilai Persepsi 3 dengan Mutu Pelayanan **Baik (85,79)**, dengan hasil rata-rata perhitungan Tahun 2024 adalah **88,88 + 85,79 = 87,34** dengan Kategori Mutu Pelayanan adalah **Baik**. Sebagai pembandingan untuk tahun 2019 kategori Baik, tahun 2020 kategori Sangat Baik, tahun

2021 kategori Baik, tahun 2022 kategori Baik, tahun 2023 kategori Sangat Baik dan Tahun 2024 kategori Sangat Baik.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Dinas PMD Kab. Minahasa Semester I dan II Tahun 2024 dengan metode pengisian lembaran survey yang di bagikan di saat pengguna layanan mendapatkan layanan di kantor.

Pengguna layanan yang berpartisipasi lewat pengisian e-kuesioner tersebut untuk Semester I berjumlah 32 responden dan Semester II berjumlah 35 responden.

Berikut akan diuraikan tabel hasil SKM yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan.

*Tabel rata-rata skor dan peringkat setiap unsure pelayanan Tahun 2024*

| No | Unsur Pelayanan                         | Skor       |             |           | Kategori    | Mutu Pelayanan | Peringkat |
|----|---|------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|    |   | Semester I | Semester II | Rata-Rata |             |                |           |
| 1  | Persyaratan                             | 3,41       | 3,26        | 3,335     | Baik        | B              | 5         |
| 2  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | 3,38       | 3,29        | 3,335     | Baik        | B              | 5         |
| 3  | Waktu Pelayanan                         | 3,31       | 3,26        | 3,285     | Baik        | B              | 6         |
| 4  | Biaya / Tarif                           | 3,88       | 4,00        | 3,94      | Sangat Baik | A              | 1         |
| 5  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3,41       | 3,29        | 3,35      | Baik        | B              | 4         |
| 6  | Kompetensi Pelaksana                    | 3,63       | 3,43        | 3,485     | Sangat Baik | A              | 3         |
| 7  | Perilaku Pelaksana                      | 3,66       | 3,46        | 3,56      | Sangat Baik | A              | 2         |
| 8  | Sarana Prasarana                        | 3,38       | 3,03        | 3,205     | Baik        | B              | 7         |
| 9  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,97       | 3,91        | 3,94      | Sangat Baik | A              | 1         |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Hasil review terhadap Renstra Kemendagri, Kemendesa PDT dan Renstra Dinas PMDD Provinsi Sulut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa dengan Renstra Kemendagri, Kemendesa PDT dan Renstra Dinas PMDD Provinsi Sulawesi Utara serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau kementerian dalam negeri, kementerian desa PDTT dengan Dinas PMDD Provinsi Sulut dan Dinas PMD Kab. Minahasa.

Komparasi capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa terhadap Sasaran Renstra Dinas PMDD Provinsi Sulut dan renstra Kemendagri serta Renstra Kemendesa PDT di gambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4.1**

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa Terhadap Sasaran Renstra DPMDD Prov. Sulut dan Renstra Kemendagri serta Kemendesa PDT

| No | Sasaran Renstra DPMD Kab. Minahasa | Sasaran Renstra DPMDD Provinsi   | Sasaran Renstra Kemendagri   | Sasaran Renstra Kemendesa PDT  |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| 1  | 3                                  | 4  | 5  | 5  |
| 1  | Meningkatnya Keberdayaan Desa      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</li> <li>- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kemandirian Desa</li> <li>- Meningkatkan Daya Saing</li> <li>- Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan</li> </ul> |
|    |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di 38 Provinsi</li> </ul> |  |

Untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka menjalankan arah dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa selama 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan informasi yang valid, reliable dan aktual untuk menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan yang komprehensif dan terintegral. Untuk ini maka analisis lingkungan internal dan eksternal menjadi suatu hal yang sangat krusial.

#### 1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

##### a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Minahasa dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya

khususnya dalam perumusan kebijakan teknis berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas program dan kegiatan sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, memiliki potensi untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera, serta Misi yang ke tiga Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, dengan tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri.
- 5) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes PPDT.
- 6) Tersedianya dokumen Renstra, Renja, DPA dan DPPA sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bersifat mengkoordinasikan teknis kegiatan dengan organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait.
- 2) Belum adanya sistem informasi dan database di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang komprehensif dan terintegrasi.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.
- 4) Masih lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome dan mengetahui dampak kegiatannya guna memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan program, sebagai akibat dari keterbatasan anggaran

## 2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

### a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Tersediaanya regulasi yang menunjang terlaksananya program dan kegiatan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peranturan menteri terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
- 2) Organisasi perangkat daerah terkait lainnya baik di tingkat kabupaten maupun provinsi yang menunjang implementasi program dan kegiatan
- 3) Kebijakan pemerintah pusat tentang arah pembangunan nasional yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran dan desa sesuai nawa cita
- 4) Keterbukaan informasi dan teknologi Informasi yang terus berkembang.

### b. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta
- 2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/sdm (aparatur pemerintah daerah, pemerintahan desa dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
- 4) Luasnya wilayah pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu 25 kecamatan dan 270 desa dan kelurahan
- 5) Kualitas sumberdaya manusia yang tidak merata di desa dan kelurahan

- 6) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
  - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
  - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan wirausahaan.
  - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
  - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan.
  - Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial.
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.
  - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan Negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
4. Pengembangan Ekonomi Kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa dengan kota
  - Mengembangkan kerjasama antar desa, dan antar daerah dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.
5. Pengembangan Kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam :
    - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
    - Pengelolaan asset dan keuangan
    - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
    - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan diluar jam kantor oleh desa, kelurahan dan kecamatan
    - Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranan pemerintahan desa
    - Mengembangkan kerjasama antar desa
    - Melaksanakan penataan desa
    - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
- Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang undang desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat undang undang desa, termasuk penyusunan peraturan pemerintah sistem Keuangan desa.
  - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap
  - Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, Pemerintah Pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa masih menemui beberapa kendala yakni :

1. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa
2. Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah desa Penguatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Masyarakat desa yang belum maksimal
3. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana perdesaan
4. Adanya Kepala Desa/Hukum Tua yang telah habis masa jabatannya sehingga diperlukan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua secara serentak.

5. Pembinaan Perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan program pembangunan desa yang akurat dan efektif sesuai kebutuhan.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas
7. Pembinaan sistem informasi dan data profil desa serta evaluasi perkembangan desa.

Selanjutnya dalam menunjang program pembangunan nasional berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS), pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal akan memprioritaskan anggaran Dana Desa tahun 2025 untuk pembangunan berkelanjutan di desa.

Terdapat beberapa focus anggaran dana desa tahun 2025 :

- 1) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Menekankan percepatan Pembangunan desa yang berkelanjutan dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
- 2) Penguatan Ekonomi Desa. Mencakup berbagai prioritas utama yang berfokus pada penguatan ekonomi desa.
- 3) Pembangunan Infrastruktur Dasar. Fokus lainnya adalah Pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat desa.
- 4) Ketahanan Pangan. Dana Desa juga digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan desa.
- 5) Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.

Adapun 18 SDGs Desa yang sudah ditetapkan sampai tahun 2030, yaitu:

1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
9. Infrastruktur dan Ekonomi Desa sesuai Kebutuhan
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman
12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim
14. Desa Peduli Lingkungan Laut
15. Desa Peduli Lingkungan Darat

16. Desa Damai Berkeadilan

17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Dalam konteks pemberdayaan Masyarakat dan desa, beberapa SDGs yang relevan adalah :

- Meningkatkan akses ke sumber daya ekonomi bagi Masyarakat miskin dan rentan.
- Mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan.
- Meningkatkan kapasitas Masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan.
- Mengembangkan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan social.

Dengan mencapai target-target SDGs ini, pemberdayaan Masyarakat dan desa dapat meningkat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Belum disesuaikan nomenklatur Dinas PMD berdasarkan Perbup Minahasa Nomor 55 Tahun 2022.
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua mengalami penundaan.
3. Alokasi anggaran dan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa belum memadai (begitupun dengan sarana prasarana kantor Hukum Tua masih banyak yang belum memadai)
4. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD belum optimal.

**Tabel 3.1.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

| <b>NO</b> | <b>MASALAH POKOK</b>   | <b>MASALAH</b>   | <b>AKAR MASALAH</b>   |
|-----------|--|--|---|
| 1         | Nomenklatur Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang di Dinas PMD Kab. Minahasa mengalami perubahan | Pelaksanaan Tugas tidak akan efektif sehingga perlu adanya pelantikan sesuai dengan Tupoksi yang ada | - Adanya Perbup Minahasa No. 55 Tahun 2022, yang secara otomatis mengganti Perbup Minahasa No. 58 Tahun 2016  |
| 2         | PILHUT Tahun 2025  | Pelaksanaan PILHUT untuk 129 desa di Tahun 2025  | - Belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2025 |
| 3         | Sarana Prasarana kantor Dinas PMD dan Kantor Hukum Tua   | Kurang memadainya sarana prasarana kantor Dinas PMD dan kantor Hukum Tua                             | - Belum memadainya penganggaran untuk sarana prasarana kantor Dinas PMD, begitupun dengan kantor Hukum Tua    |
| 4         | Tugas dan Fungsi Aparatur  | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa  | - Kurang pahami Tupoksi aparaturnya   |

| NO | MASALAH POKOK             | MASALAH               | AKAR MASALAH            |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|    | Pemerintahan Desa dan BPD | dan BPD belum optimal | Pemerintah Desa dan BPD |

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### VISI :

Dengan memperhatikan potensi dan kondisi daerah, maka untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) bagi Kabupaten Minahasa diharapkan akan terwujud beberapa kondisi sebagaimana yang terangkum dalam visi daerah yaitu : **"Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera"**

#### MISI :

Berdasarkan Visi Minahasa maka disusunlah Misi Minahasa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Minahasa yang Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan untuk Mewujudkan Ekonomi yang Tangguh.
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis Digitalisasi dan Inovatif untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, yaitu terkait dengan Misi ke-I Meningkatkan Kualitas SDM Minahasa yang Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing, dan Misi ke-III Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis Digitalisasi dan Inovatif untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 1. Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Utara (2025-2029)

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu : "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan", dimana dari visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba.
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Membangun Perekonomian Daerah.
- d. Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional.
- e. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi dan Air yang Merata dan Berkelanjutan.

- f. Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Nyaman dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya yang Berkearifan Lokal.
  - g. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
  - h. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan.
2. Renstra Kemendagri RI dan Kemendesa PDT RI, berpedoman pada Visi dan Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden (2025-2029).

Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, selanjutnya dirumuskan Asta Cita sebagai berikut :

- 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- 3. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur.
- 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
- 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
- 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.
- 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Faktor-faktor penghambat Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perangkat Daerah DPMDD Provinsi Sulawesi Utara, Kemendagri serta Kemendesa PDT, yaitu :

- a. Kemampuan anggaran pemerintah untuk memperbaiki Sarana Prasarana Desa
- b. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang dan sumber daya alam yang tersedia dalam rangka memperbaiki pendapatan ekonomi
- c. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas

- d. Integrasi program dan kegiatan disemua aras pemerintahan belum sepenuhnya berlangsung dengan baik
- e. SDM aparatur pemerintah desa yang terbatas
- f. Peran Kelembagaan desa yang belum optimal disebabkan keterbatasan sumberdaya
- g. Mulai memudarnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan/ kearifan local seperti budaya mapalus dalam pembangunan
- h. Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang belum berfungsi dengan baik, serta sumberdaya pelaku ekonomi yang rendah
- i. Prasarana pengembangan TTG terbatas, serta rendahnya penguasaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam

Faktor-faktor pendukung Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perangkat Daerah DPMDD Provinsi Sulawesi Utara, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri serta Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDT, yaitu :

- 1. Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan
- 2. Alokasi dana APBD, APBN
- 3. Visi, Misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa
- 4. Koordinasi antar dinas/instansi terkait
- 5. Perangkat Pemerintahan di tingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan
- 6. Adanya kegiatan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan dan ketrampilan
- 7. Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa melalui berbagai kegiatan

### **3.4 Penentuan Isu Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- 1. Pengentasan Kemiskinan dan Stunting. Menjadi fokus utama dalam pembangunan desa, dengan penekanan pada intervensi gizi seimbang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
- 2. Pemberdayaan Ekonomi Desa. Melalui pengembangan BUM Desa dan Kewirausahaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
- 3. Partisipasi Masyarakat. Meningkatkan peran aktif warga desa dalam pengambilan keputusan publik dan pembangunan desa melalui perencanaan partisipatif dan pemantauan anggaran.

4. Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Desa. Membangun infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Melakukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah sesuai dengan Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan strategis yang ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi dimaksud. Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa. Selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa terkait Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

- Visi : Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera
- Misi ke-2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh
- Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
- Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatkan Keberdayaan Desa
- Misi ke-3 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digitalisasi dan Inovatif untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi

Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya rumusan rangkaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1.***Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa*

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target Capaian Setiap Tahun |                        |                        |                        |                        |                        | Kondisi Kinerja Akhir Periode |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|    |   |   |   | 2025                        | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   | 2030                   |                               |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                           | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     | 11                            |
| 1. | Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan kemandirian desa   | Meningkatnya Keberdayaan Desa   | IDM   | 0,837                       | 0,838                  | 0,839                  | 0,840                  | 0,841                  | 0,842                  | 0,842                         |
|    |   |   | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal                                    | 100%                        | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                          |
|    |   |   | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri                                | 94,95%                      | 99,16%                 | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                          |
|    |   |   | Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten        | 12,33%                      | 15,85%                 | 17,18%                 | 18,50%                 | 19,82%                 | 21,14%                 | 21,14%                        |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                  | B                           | B                      | B                      | B                      | B                      | B                      | B                             |
|    |   |   | Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah | B                           | B                      | B                      | B                      | B                      | B                      | B                             |
|    |   |   | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik  | (76,61–88,30) Baik (3)      | (76,61–88,30) Baik (3) | (76,61–88,30) Baik (3) | (76,61–88,30) Baik (3) | (76,61–88,30) Baik (3) | (76,61–88,30) Baik (3) | (76,61–88,30) Baik (3)        |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, merupakan suatu arah tindakan yang akan diambil oleh Perangkat Daerah dalam suatu lingkungan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan yang diambil oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa serta sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Gambaran strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam menunjang Visi dan Misi, dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.1.**

*Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa*

| <b>VISI : "MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA"</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh</b>                                  |   |   |   |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Kebijakan</b>  |
| Meningkatkan Pembangunan Desa yang Berkualitas  | - Meningkatnya Keberdayaan Desa   | 1) Pemberdayaan Masyarakat                              | Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan pengambilan keputusan                                       |
|   |   | 2) Pengembangan Ekonomi Lokal                           | Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan kewirausahaan masyarakat desa |
|   |   | 3) Pembangunan infrastruktur                            | Memotivasi desa dalam pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa       |
|   |   | 4) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa                | Fasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan kemampuan mengelola Pembangunan desa                        |
| <b>MISI 3 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digitalisasi dan Inovatif untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima</b> |   |   |   |
| Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi     | - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | 1) Optimalisasi pelayanan dan pengadministrasian kantor | Fasilitasi pelayanan dan pengadministrasian kantor  |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang disusun untuk periode 2025-2029 diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.1.1**

*Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa  
Tahun 2025-2029*

| Tujuan   | Sasaran                               | Indikator Tujuan/<br>Sasaran   | Kode       | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan   | Data<br>Capaian<br>pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan<br>(2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | Unit Kerja<br>SKPD<br>Penang<br>g<br>jawab |   |           |
|--|---------------------------------------|--|------------|--|--|--|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|---|-----------|
|  |                                       |  |            |  |  |  | Tahun-2025                                    |           | Tahun-2026 |           | Tahun-2027 |           | Tahun-2028 |           | Tahun-2029 |           | Tahun-2030 |           |  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>SKPD |           |
|  |                                       |  |            |  |  |  | target  | Rp. (000) | target     | Rp. (000) | target     | Rp. (000) | Target     | Rp. (000) | target     | Rp. (000) | target     | Rp. (000) |  | Target  | Rp. (000) |
| (1)  | (2)                                   | (3)  | (4)        | (5)  | (6)  | (7)  | (8)   | (9)       | (10)       | (11)      | (12)       | (13)      | (14)       | (15)      | (18)       | (19)      | (20)       |           |  |   |           |
|  |                                       |  |            | <b>Urusan Pemerintah Wajib Bukan<br/>Pelayanan Dasar</b>                         |  |  |   |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |   |           |
|  |                                       |  | 13         | <b>Urusan Pemerintahan Bidang<br/>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>               |  |  |   | 8.694.710 | 6.257.234  | 7.126.451 |            | 7.322.100 |            | 7.521.955 |            | 7.726.802 |            |           |  | DPMD  |           |
| Meningkatn<br>ya pemberday<br>aan Masyarak<br>at dan<br>kemandiria<br>n desa |                                       | IDM  |            |  |  |  | 0,837   | 8.694.710 | 0,838      | 6.257.234 | 0,839      | 7.126.451 | 0,840      | 7.322.100 | 0,841      | 7.521.955 | 0,842      | 7.726.802 | 87,22%                                     |   |           |
|  | Meningkatn<br>ya Keberdayaa<br>n Desa | Persentase<br>Pengentasan<br>Desa Tertinggal                                   |            |  |  | 100%   | 100%  | 4.463.915 | 100%       | 2.002.001 | 100%       | 2.819.500 | 100%       | 2.972.100 | 100%       | 3.146.955 | 100%       | 3.326.802 | 100%                                       |   |           |
|  |                                       | Persentase<br>Peningkatan<br>Status Desa<br>Mandiri                            |            |  |  | 93,27%   | 94,95<br>%                                    |           | 99,16%     |           | 100%       |           | 100%       |           | 100%       |           | 100%       |           | 100%                                       |   |           |
|  |                                       | Persentase Desa<br>dengan Predikat<br>Desa Berprestasi<br>Tingkat<br>Kabupaten |            |  |  | 11,89%   | 12,33<br>%                                    |           | 15,85%     |           | 17,18%     |           | 18,50%     |           | 19,82%     |           | 21,14%     |           | 21,14%                                     |   |           |
|  |                                       |  | 02         | <b>Program Penataan Desa</b>   | <b>Persentase fasilitasi<br/>penataan desa</b>   | 55,5%  | 61%   | 0         | 66,51%     | 120.000   | 72,02%     | 152.500   | 77,53%     | 175.000   | 83,03%     | 200.000   | 88,54%     | 225.000   | 88,54%                                     | DPMD  |           |
|  |                                       |  |            |  | <b>Cakupan sarana prasarana<br/>perkantoran pemerintahan<br/>desa yang baik</b>                          | 90,96%   | 91,07<br>%                                    |           | 91,18%     |           | 91,29%     |           | 91,40%     |           | 91,51%     |           | 91,62%     |           | 91,62%                                     |   |           |
|  |                                       |  |            | Kegiatan:  |  |  |   |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |   |           |
|  |                                       |  | 02.2.01    | Penyelenggaraan Penataan Desa  | Jumlah desa dalam<br>penyelenggaraan penataan<br>desa  | 227 desa   | 227   | 0         | 227        | 120.000   | 227        | 152.500   | 227        | 175.000   | 227        | 200.000   | 227        | 225.000   | 227  | DPMD  |           |
|  |                                       |  |            | Sub Kegiatan:  |  |  |   |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |   |           |
|  |                                       |  | 02.2.01.01 | Pembentukan, Penghapusan,<br>Penggabungan dan Perubahan Status<br>Desa           | Jumlah Desa yang<br>Melakukan Pembentukan,<br>Penghapusan,<br>Penggabungan, dan<br>Perubahan Status Desa |  |   | 0         |            | 0         |            | 0         |            |           |            |           |            |           |  | DPMD  |           |

|  |  |  |            |   |   |        |       |  |           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |      |      |
|--|--|--|------------|---|---|--------|-------|--|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|------|
|  |  |  | 02.2.01.02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa  | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya  | 25     | 25    |  | 25        | 35.000 | 25      | 45.000  | 25      | 50.000  | 25      | 55.000  | 25      | 60.000  | 175     |       | DPMD |      |
|  |  |  | 02.2.01.03 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa   | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya   | 227    | 227   |  | 227       | 35.000 | 227     | 45.000  | 227     | 50.000  | 227     | 55.000  | 227     | 60.000  | 227     |       | DPMD |      |
|  |  |  | 02.2.01.04 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa   | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa   |        |       |  |           | 0      |         | 0       |         |         |         |         |         |         |         |       | DPMD |      |
|  |  |  | 02.2.01.05 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota |        |       |  |           | 0      |         | 0       |         |         |         |         |         |         |         |       | DPMD |      |
|  |  |  | 02.2.01.06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa  | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa  | 0      | 2     |  | 2         | 50.000 | 2       | 62.500  | 2       | 75.000  | 3       | 90.000  | 3       | 105.000 | 14      |       | DPMD |      |
|  |  |  |            |   |   |        |       |  |           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |      |      |
|  |  |  | 03         | <b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>   | <b>Persentase fasilitasi kerjasama desa</b>   | %      | 33,48 |  | 29.600    | 34,36  | 129.600 | 35,24   | 187.500 | 36,12   | 200.000 | 37      | 225.000 | 37,88   | 250.000 | 37,88 |      | DPMD |
|  |  |  |            |   | Kegiatan:   |        |       |  |           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |      |      |
|  |  |  | 03.2.01    | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa   | Jumlah desa yang akan difasilitasi kerja sama antar desa  | 74     | 2     |  | 29.600    | 2      | 129.600 | 2       | 187.500 | 2       | 200.000 | 2       | 225.000 | 2       | 250.000 | 86    |      | DPMD |
|  |  |  |            |   | Sub Kegiatan:   |        |       |  |           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |      |      |
|  |  |  | 03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota   | 74     | 2     |  | 29.600    | 2      | 29.600  | 2       | 32.500  | 2       | 40.000  | 2       | 50.000  | 2       | 60.000  | 86    |      | DPMD |
|  |  |  | 03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                         | 227    | 227   |  | 227       | 50.000 | 227     | 100.000 | 227     | 100.000 | 227     | 110.000 | 227     | 115.000 | 227     |       | DPMD |      |
|  |  |  | 03.2.01.03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan   |        | 1     |  | 1         | 50.000 | 1       | 55.000  | 1       | 60.000  | 1       | 65.000  | 1       | 75.000  | 6       |       | DPMD |      |
|  |  |  |            |   |   |        |       |  |           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |      |      |
|  |  |  | 04         | <b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>   | <b>Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                        |        | 73,45 |  | 3.261.595 | 74,48  | 544.682 | 75,52   | 577.500 | 76,55   | 600.000 | 77,58   | 625.000 | 78,62   | 650.000 | 78,62 |      | DPMD |
|  |  |  |            |   | <b>Persentase fasilitasi tata kelola desa</b>   |        | 100   |  |           | 100    |         | 100     |         | 100     |         | 100     |         | 100     |         | 100   |      |      |
|  |  |  |            |   | <b>Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik</b>                         | 32,15% | 32,59 |  | 42,29     |        | 47,13   |         | 51,98   |         | 56,82   |         | 61,66   |         | 61,66   |       |      |      |
|  |  |  |            |   | <b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas</b>                  | 100%   | 100   |  | 100       |        | 100     |         | 100     |         | 100     |         | 100     |         | 100     |       |      |      |
|  |  |  |            |   | <b>Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas</b>           | 100%   | 100   |  | 100       |        | 100     |         | 100     |         | 100     |         | 100     |         | 100     |       |      |      |
|  |  |  |            |   | <b>Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten</b>                              | 0,57%  | 0,58  |  | 0,83      |        | 0,95    |         | 1,07    |         | 1,18    |         | 1,30    |         | 1,30    |       |      |      |

|  |  |  |            |   | Persentase BUM Desa berprestasi tingkat kabupaten  | 7,92%     | 9,25 |           | 11,45 |         | 12,77 |         | 14,09 |         | 15,41 |         | 16,73 |         | 16,73 |  |  |      |      |
|--|--|--|------------|---|--|-----------|------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--|--|------|------|
|  |  |  |            | Kegiatan:   |  |           |      |           |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |  |  |      |      |
|  |  |  | 04.2.01    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa  | 227 desa  | 227  | 3.261.595 | 227   | 544.682 | 227   | 577.500 | 227   | 600.000 | 227   | 625.000 | 227   | 650.000 | 227   |  |  | DPMD |      |
|  |  |  |            |   | Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan  | 270 d/k   | 270  |           | 270   |         | 270   |         | 270   |         | 270   |         | 270   |         | 270   |  |  |      |      |
|  |  |  |            |   | Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa                     | 227 desa  | 227  |           | 227   |         | 227   |         | 227   |         | 227   |         | 227   |         | 227   |  |  |      |      |
|  |  |  |            |   | Jumlah BUMDesa berprestasi tingkat kabupaten   | 20 Bumdes | 3    |           | 3     |         | 3     |         | 3     |         | 3     |         | 3     |         | 38    |  |  |      |      |
|  |  |  |            |   | Jumlah aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten                              | 20        | 4    |           | 4     |         | 4     |         | 4     |         | 4     |         | 4     |         |       |  |  |      |      |
|  |  |  |            | Sub Kegiatan  |  |           |      |           |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |  |  |      |      |
|  |  |  | 04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa               | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                              | 1         | 1    | 29.635    | 1     | 29.635  | 1     | 32.500  | 1     | 35.000  | 1     | 35.000  | 1     | 40.000  |       |  |  | DPMD |      |
|  |  |  | 04.2.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa  | 1         | 1    | 22.135    | 1     | 25.000  | 1     | 27.500  | 1     | 30.000  | 1     | 30.000  | 1     | 35.000  |       |  |  | DPMD |      |
|  |  |  | 04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                               | 2         | 1    | 49.500    | 1     | 49.500  | 1     | 50.000  | 1     | 50.000  | 1     | 52.500  | 1     | 55.000  |       |  |  | DPMD |      |
|  |  |  | 04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa   | 227       | 227  | 49.999    | 227   | 49.777  | 227   | 52.500  | 227   | 52.500  | 227   | 55.000  | 227   | 55.000  | 227   |  |  |      | DPMD |
|  |  |  | 04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa              | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas             | 88        | 22   | 35.008    | 22    | 35.008  | 22    | 37.500  | 22    | 40.000  | 22    | 40.000  | 22    | 42.500  | 220   |  |  |      | DPMD |
|  |  |  | 04.2.01.06 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa   |           | 1    | 15.380    | 1     | 15.380  | 1     | 17.500  | 1     | 20.000  | 1     | 25.000  | 1     | 25.000  | 6     |  |  |      | DPMD |
|  |  |  | 04.2.01.07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                | 1         | 2    | 48.810    | 2     | 48.810  | 2     | 50.000  | 2     | 52.500  | 2     | 55.000  | 2     | 55.000  | 13    |  |  |      | DPMD |
|  |  |  | 04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 6         | 2    | 49.946    | 2     | 49.946  | 2     | 52.500  | 2     | 52.500  | 2     | 55.000  | 2     | 55.000  | 18    |  |  |      | DPMD |
|  |  |  | 04.2.01.09 | Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa    | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 98        | 129  | 2.764.008 |       | 0       |       | 0       |       | 0       |       | 0       |       | 0       | 227   |  |  |      | DPMD |
|  |  |  | 04.2.01.10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               |           |      | 0         |       | 10      |       | 0       |       | 0       |       | 0       |       | 0       |       |  |  |      | DPMD |

|  |  |  |            |  |   |               |              |                  |              |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |     |             |  |
|--|--|--|------------|--|---|---------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----|-------------|--|
|  |  |  | 04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  | Jumlah Dokumen Profil Desa  | 2             | 1            | 32.415           | 1            | 32.415           | 1             | 35.000           | 1             | 37.500           | 1             | 37.500           | 1             | 40.000           | 8             |     | DPMD        |  |
|  |  |  | 04.2.01.12 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                       |               | 1            | 20.467           | 1            | 25.000           | 1             | 27.500           | 1             | 27.500           | 1             | 27.500           | 1             | 30.000           | 6             |     |             |  |
|  |  |  | 04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa  | 3             | 1            | 29.959           | 1            | 29.959           | 1             | 32.500           | 1             | 35.000           | 1             | 35.000           | 1             | 37.500           | 9             |     | DPMD        |  |
|  |  |  | 04.2.01.14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD  | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                                 | 77            | 25           | 0                | 25           | 40.000           | 25            | 42.500           | 25            | 42.500           | 25            | 45.000           | 25            | 45.000           |               |     | DPMD        |  |
|  |  |  | 04.2.01.15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa  | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                            |               |              | 0                |              | 0                |               | 0                |               | 0                |               | 0                |               | 0                |               |     |             |  |
|  |  |  | 04.2.01.16 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa  |               | 1            | 34.429           | 1            | 34.429           | 1             | 37.500           | 1             | 40.000           | 1             | 45.000           | 1             | 45.000           | 6             |     | DPMD        |  |
|  |  |  | 04.2.01.17 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa   | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa             |               |              | 0                |              | 0                |               | 0                |               | 0                |               | 0                |               | 0                |               |     |             |  |
|  |  |  | 04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                    | 5             | 1            | 79.821           | 1            | 79.821           | 1             | 82.500           | 1             | 85.000           | 1             | 87.500           | 1             | 90.000           | 11            |     | DPMD        |  |
|  |  |  |            |  |   |               |              |                  |              |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |     |             |  |
|  |  |  | 05         | <b>Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>   | <b>Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)</b>                       | <b>25%</b>    | <b>25%</b>   | <b>1.172.719</b> | <b>25%</b>   | <b>1.207.719</b> | <b>26,85%</b> | <b>1.902.000</b> | <b>28,70%</b> | <b>1.997.100</b> | <b>30,56%</b> | <b>2.096.955</b> | <b>32,41%</b> | <b>2.201.802</b> | <b>32,41%</b> |     | <b>DPMD</b> |  |
|  |  |  |            |  | <b>Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat</b>     |               | <b>0</b>     | <b>0</b>         |              | <b>0</b>         |               | <b>0</b>         |               | <b>0</b>         |               | <b>0</b>         |               | <b>0</b>         |               |     |             |  |
|  |  |  |            |  | <b>Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa</b>              | <b>100%</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>       |              | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               |     |             |  |
|  |  |  |            |  | <b>Persentase PKK aktif</b>   | <b>100%</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>       |              | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               |     |             |  |
|  |  |  |            |  | <b>Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan</b> | <b>100%</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>       |              | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               | <b>100</b>       |               |     |             |  |
|  |  |  |            |  | <b>Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG</b>                                       | <b>14,97%</b> | <b>15,41</b> |                  | <b>15,85</b> |                  | <b>16,29</b>  |                  | <b>16,73</b>  |                  | <b>17,17</b>  |                  | <b>17,61</b>  |                  | <b>17,61</b>  |     |             |  |
|  |  |  |            |  | Kegiatan:   |               |              |                  |              |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |     |             |  |
|  |  |  | 05.2.01    | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyelenggaraan kegiatan TP-PKK  |               | 8            | 1.172.719        | 8            | 1.207.719        | 8             | 1.902.000        | 8             | 1.997.100        | 8             | 2.096.955        | 8             | 2.201.802        |               |     | DPMD        |  |
|  |  |  |            |  | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang   | 270           | 270          | 270              |              | 270              |               | 270              |               | 270              |               | 270              |               | 270              |               | 270 |             |  |



|   |   |   |            |  |   |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |     |  |      |
|---|---|---|------------|--|---|--|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|-----|--|------|
|   |   |   | 05.2.01.08 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa  |  | 1  | 25.410  | 1  | 25.410  | 1  | 27.000  | 1  | 30.000  | 1  | 35.000  | 1  | 40.000  | 6   |  | DPMD |
|   |   |   | 05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  |  | 2  | 250.252 | 2  | 250.252 | 2  | 250.000 | 2  | 250.000 | 2  | 264.455 | 2  | 300.000 |     |  | DPMD |
|   |   |   | 05.2.01.10 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat   |  | 25 | 25.000  | 25 | 25.000  | 25 | 27.500  | 25 | 30.000  | 25 | 35.000  | 25 | 40.000  | 175 |  | DPMD |
|   |   |   | 05.2.01.11 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Bxerualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |  |    | 0       | 25 | 25.000  | 25 | 27.500  | 25 | 30.000  | 25 | 35.000  | 25 | 40.000  | 125 |  | DPMD |
| Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi |   | Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                  |            |  |   |  | B  | B       |    | B       |    | B       |    | B       |    | B       |    | B       |     |  | DPMD |
|   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah |            |  |   |  | B  | B       |    | B       |    | B       |    | B       |    | B       |    | B       |     |  | DPMD |

|  |  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat |            |   |  | 76,61-88,30 (Baik) 3 | 76,61 - 88,30 (Baik) 3 |           | 76,61-88,30 (Baik) 3 |           | 76,61-88,30 (Baik) 3 |           | 76,61-88,30 (Baik) 3 |           | 76,61-88,30 (Baik) 3 |           | 76,61-88,30 (Baik) 3 |           | 76,61-88,30 (Baik) 3 |  | DPMD |      |
|--|--|----------------------------------|------------|---|--|----------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|--|------|------|
|  |  |                                  | 01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                 | Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah  | B                    | B                      | 4.230.795 | B                    | 4.255.232 | B                    | 4.306.951 | B                    | 4.350.000 | B                    | 4.375.000 | B                    | 4.400.000 | B                    |  |      | DPMD |
|  |  |                                  |            |   | <i>Kegiatan:</i>   |                      |                        |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |  |      |      |
|  |  |                                  | 01.2.01    | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan perbup  | 100%                 | 100                    | 4.990     | 100                  | 4.990     | 100                  | 5.000     | 100                  | 5.549     | 100                  | 6.000     | 100                  | 7.649     | 100                  |  |      | DPMD |
|  |  |                                  |            |   | Persentase dokumen penganggaran yang ditetapkan  | 100%                 | 100                    |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |  |      |      |
|  |  |                                  |            |   | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan  | 100%                 | 100                    |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |  |      |      |
|  |  |                                  |            |   | Sub Kegiatan :   |                      |                        |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |  |      |      |
|  |  |                                  | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  |                      | 3                      | 4.990     | 2                    | 4.990     | 2                    | 5.000     | 2                    | 5.549     | 2                    | 6.000     | 2                    | 7.000     | 13                   |  |      | DPMD |
|  |  |                                  | 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                      | 1                      | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 6         |                      |  |      | DPMD |
|  |  |                                  | 01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                      | 1                      | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 6         |                      |  |      | DPMD |
|  |  |                                  | 01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                      | 1                      | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 6         |                      |  |      | DPMD |
|  |  |                                  | 01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |                      | 1                      | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 6         |                      |  |      | DPMD |
|  |  |                                  | 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah   |                      | 1                      | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 0         | 1                    | 6         |                      |  |      | DPMD |
|  |  |                                  |            |   | <i>Kegiatan:</i>   |                      |                        |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |  |      |      |
|  |  |                                  | 01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan   | 100                  | 100                    | 3.509.977 | 100                  | 3.509.977 | 100                  | 3.509.977 | 100                  | 3.509.977 | 100                  | 3.509.977 | 100                  | 3.509.977 | 100                  |  |      | DPMD |
|  |  |                                  |            |   | Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan di distribusikan  | 100                  | 100                    |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |           | 100                  |  |      |      |
|  |  |                                  |            |   | Sub Kegiatan:  |                      |                        |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |  |      |      |
|  |  |                                  | 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan  | 21                   | 21                     | 3.509.977 | 21                   | 3.509.977 | 21                   | 3.509.977 | 21                   | 3.509.977 | 21                   | 3.509.977 | 21                   | 3.509.977 | 21                   |  |      | DPMD |





|  |  |  |            |  |  |  |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |  |  |      |
|--|--|--|------------|--|--|--|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--|--|------|
|  |  |  | 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                |  | 1 | 26.224 | 1 | 30.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |  |  | DPMD |
|  |  |  | 01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | 1 | 0      | 1 | 30.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |  |  | DPMD |

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal mengenai kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja instansi.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi dapat juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Gambaran indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2025-2029 digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 7.1.**  
*Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029*

| No       | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                                    | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|----------|---|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|          |   | 2024                                    | 2025                        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                                     |
| <i>1</i> | <i>2</i>  | <i>3</i>                                | <i>4</i>                    | <i>5</i>      | <i>6</i>      | <i>7</i>      | <i>8</i>      | <i>9</i>      | <i>10</i>                           |
| 1        | Persentase Desa Mandiri   | 82,38                                   | 82,81                       | 83,70         | 84,58         | 85,46         | 86,34         | 87,22         | 87,22                               |
| 2        | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal                                    | 100                                     | 100                         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                                 |
| 3        | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri                                | 93,27                                   | 94,95                       | 99,16         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                                 |
| 4        | Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten        | 11,89                                   | 12,33                       | 15,85         | 17,18         | 18,50         | 19,82         | 21,14         | 21,14                               |
| 5        | Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                  |   | B                           | B             | B             | B             | B             | B             | B                                   |
| 6        | Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah | B                                       | B                           | B             | B             | B             | B             | B             | B                                   |
| 7        | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  | (76,61–88,30)                           | (76,61–88,30)               | (76,61–88,30) | (76,61–88,30) | (76,61–88,30) | (76,61–88,30) | (76,61–88,30) | (76,61–88,30)                       |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra ini memuat Visi dan Misi RPJMD 2025-2029, dan merupakan acuan panduan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Minahasa termasuk di seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan Renstra sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan disesuaikan menjadi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa setiap tahunnya. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa seterusnya akan menjadi pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa (RKA-DPMD) dan menjadi alat ukur untuk mengevaluasi implementasi program dan kegiatan.

Tondano,

2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KEPALA,

**Drs. ARTHUR N. PALILINGAN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680323 198902 1 002